

Bab 1

Pergerakan Mempertahankan Kemerdekaan

Tujuan Pembelajaran

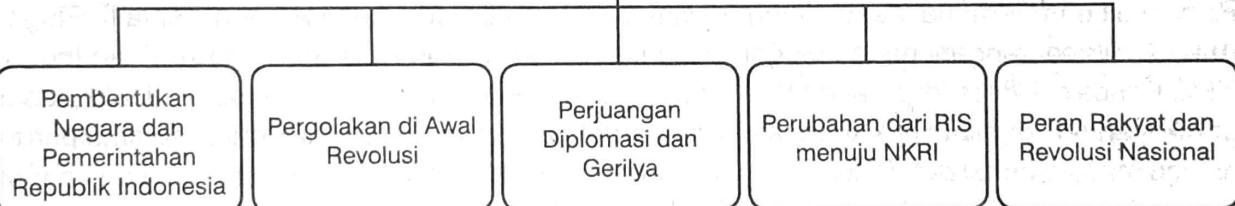
Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan dinamika proses pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia pasca-Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia;
2. menjelaskan dinamika pergolakan di periode awal Revolusi Indonesia;
3. menganalisis dinamika dan proses bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya melalui upaya gerilya dan diplomasi;
4. menganalisis peranan rakyat Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan periode Revolusi Indonesia 1945–1950.

Peta Konsep

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Membahas tentang



A

Apersepsi

Dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak serta merta terbebas dari belenggu penjajahan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mendapat respons dari negara-negara internasional. Belanda merespons hal tersebut dengan datang kembali ke Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Indonesia pimpinan Soekarno-Hatta. Belanda datang ke Indonesia dengan menumpang kapal tentara Sekutu (AFNEI) yang sedang bertugas untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang di Indonesia. Dengan sekuat tenaga, rakyat Indonesia bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan. Selain melalui jalan peperangan (konfrontasi), bangsa Indonesia juga melakukan diplomasi dengan Negara Belanda. Berbagai perjuangan, baik secara diplomasi maupun peperangan memiliki nilai kejuangan bangsa yang dapat dipahami dan diterapkan dalam revolusi menegakkan NKRI hingga saat ini. Untuk memperjelas pemahaman Anda tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pelajari materi berikut ini!



Sumber: www.pustakamadani.com

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan

Materi Pembelajaran

A. Pembentukan Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia

Proklamasi merupakan pernyataan resmi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajah. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak terjadi dengan sendirinya. Untuk mencapai peristiwa proklamasi terdapat perjuangan seluruh rakyat. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari dua peristiwa penting dunia, yaitu penandatanganan Piagam Atlantik dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.



Sumber: <https://upload.wikimedia.org>

Presiden AS Franklin D. Roosevelt dan PM Inggris Winston Churchill bertemu di atas kapal HMS Prince of Wales selama Konferensi Piagam Atlantik

Piagam Atlantik adalah deklarasi yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada masa Perang Dunia II. Piagam Atlantik ditandatangi pada tanggal 14 Agustus 1941 di atas kapal perang Kerajaan Inggris, HMS Prince of Wales, di perairan Samudra Atlantik. Tujuan dibentuknya Piagam Atlantik adalah untuk mendeklarasikan hak kebebasan, kemerdekaan, serta perdamaian dunia selama perang hingga masa mendatang. Piagam yang awalnya hanya ditandatangi oleh dua negara anggota Sekutu ini menjadi semakin penting setelah pihak Sekutu menjadi pemenang Perang Dunia II. Negara-negara yang sebelumnya dijajah menemukan momentum untuk menuntut kemerdekaan, apalagi saat itu beberapa negara Sekutu adalah penjajah. Piagam Atlantik menjadi bumerang bagi negara-negara penjajah, karena bangsa-bangsa jajahan menuntut kemerdekaan atas dasar pengakuan akan hak untuk menentukan nasib dan memiliki pemerintahan sendiri.

1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilangsungkan pada Jumat, 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi Mohammad Hatta. Proklamasi kemerdekaan RI berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta Pusat. Sesaat setelah teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, berita proklamasi disebarluaskan secara cepat oleh segala lapisan masyarakat di sekitar Jakarta, terutama oleh para pemuda. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain dengan menyebarkan pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok.

Sjahruddin selaku wartawan Kantor Berita Domei berhasil menyelundupkan teks proklamasi ke kantor pusat pemberitaan Jepang, Domei (sekarang Kantor Berita Antara) dan diterima oleh Kepala Bagian Radio, Waidan B. Palenewen. F. Wuz merupakan seorang markonis berita, menerima teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan segera membacakan berita tersebut. Pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa segera memerintahkan untuk meralat berita proklamasi dan menyatakan sebagai kekeliruan agar tidak berdampak luas. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar radio disegel oleh Jepang. Para pemuda

tidak kehilangan akal, mereka membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, seperti Soekarmen, Soetamto Soesiloharjo, dan Soehendar. Alat pemancar radio yang diambil dari Kantor Berita Domei sebagian dibawa ke rumah Waidan B. Palenewen dan sebagian ke Menteng 31. Di Menteng 31, para pemuda merakit pemancar radio baru dengan kode panggilan WK.1. Dari pemancar radio inilah, berita proklamasi terus disiarkan. Maladi kemudian memprakarsai pendirian Radio Republik Indonesia (RRI) pada tanggal 11 September 1945.



Sumber: www.wikipedia.com

Pembacaan teks proklamasi

2. Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia

Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi, segera dibentuk kelengkapan pemerintahan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara melalui PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Merdeka).

a. Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945

Sidang pertama PPKI berkaitan dengan terbentuknya pemerintahan NKRI, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut.

1) Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. UUD merupakan hukum dasar tertulis. UUD di Indonesia dirancang oleh BPUPK pada tanggal 10–16 Juli 1945 dalam sebuah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Rancangan UUD tersebut kemudian dibawa ke sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 untuk dibahas. Sebelum PPKI mengesahkan rancangan UUD, Soekarno dan Hatta menugaskan Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan untuk membahas rancangan Pembentukan Undang-Undang Dasar. Rancangan tersebut kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Namun, rancangan tersebut telah menimbulkan keberatan dari sejumlah pihak karena adanya kalimat yang dianggap membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirnya, persidangan PPKI berhasil mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia dengan beberapa perubahan.

2) Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama. Pukul 15.00 WIB sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dimulai kembali. Agenda utamanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai dasar hukum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut, harus disahkan dahulu, yakni Pasal 3 dari Aturan Peralihan. Ini menandai untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI.

Berdasarkan usul dari Otto Iskandardinata, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dilakukan secara aklamasi. Pada saat itu, Otto Iskandardinata secara spontan mengajukan Ir. Soekarno sebagai Presiden Indonesia, sedangkan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Anggota PPKI yang mengikuti sidang secara serentak menyetujui usulan tersebut.

- 3) Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945 juga menyepakati tentang dibentuknya semacam lembaga yang bertugas untuk membantu tugas Presiden sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pemilihan umum (pemilu). Lembaga tersebut kemudian dinamakan dengan Komite Nasional Indonesia.

b. Sidang PPKI Tanggal 19 Agustus 1945

- 1) Membentuk kementerian dan lembaga Negara Indonesia

Kementerian merupakan aspek penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Soekarno menunjuk Mr. Kasman, Ahmad Soebardjo, dan Sutardjo Kartohadikusumo untuk membentuk panitia kecil membahas tentang kementerian Indonesia, lembaga negara, dan pembentukan provinsi. Soekarno menindaklanjuti hasil dari panitia kecil tersebut dengan membentuk kabinet pertama Indoensia. Ada dua belas kementerian dan empat lembaga tinggi negara, antara lain Menteri Dalam Negeri (R.A.A. Wiranatakusuma); Menteri Luar Negeri (Ahmad Soebardjo); Menteri Keuangan (A.A. Maramis); Menteri Kehakiman (Prof. Mr. Dr. Soepomo, S.H.); Menteri Kemakmuran (Ir. Soerachman Tjokro Adisoeryo); Menteri Keamanan Rakyat (Soepriyadi); Menteri Kesehatan (Dr. Buntaran Martoatmojo); Menteri Pengajaran (Ki Hajar Dewantoro); Menteri Penerangan (Mr. Amir Sjarifuddin, wakilnya Mr. Ali Sastroamidjojo); Menteri Sosial (Iwa Koesoemasoemantri); Menteri Pekerjaan Umum (Abikusno Cokro Suyoso); Menteri Perhubungan (ad interm; Abikusno Cokro Suyoso).

Lembaga tinggi negara yang diangkat setara menteri, seperti berikut ini.

- a) Ketua Mahkamah Agung : Dr. Mr. Kusumaatmadja
- b) Jaksa Agung : Gatot Taroenamihardja
- c) Sekretaris Negara : A.G. Pringgodigdo
- d) Juru Bicara Negara : Soekarjo Wirjopranoto

- 2) Pembentukan provinsi serta memimpin daerah

Atas rekomendasi dari Otto Iskandardinata, pada tanggal 2 September, Presiden Soekarno membentuk delapan provinsi beserta pemimpin daerahnya. Pembagian provinsi ini bersamaan dengan pelantikan kementerian dan lembaga tinggi negara.

- 3) Pembentukan badan-badan negara

Pada tanggal 19 Agustus 1945 di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa di Jalan Gambir Selatan (sekarang Merdeka Selatan) No. 10, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Sartono, Soewirjo, Otto Iskandardinata, Soekardjo Wirjopranoto, Dr. Buntaran, Mr. A.G. Pringgodigdo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Dr. Tajuluddin, berkumpul untuk membahas kembali tentang KNI yang terdiri atas KNI Pusat (KNIP) dan KNI di daerah (KNID). Selain itu, mereka juga membahas tentang keanggotaan KNIP.

c. Sidang PPKI Tanggal 22 Agustus 1945

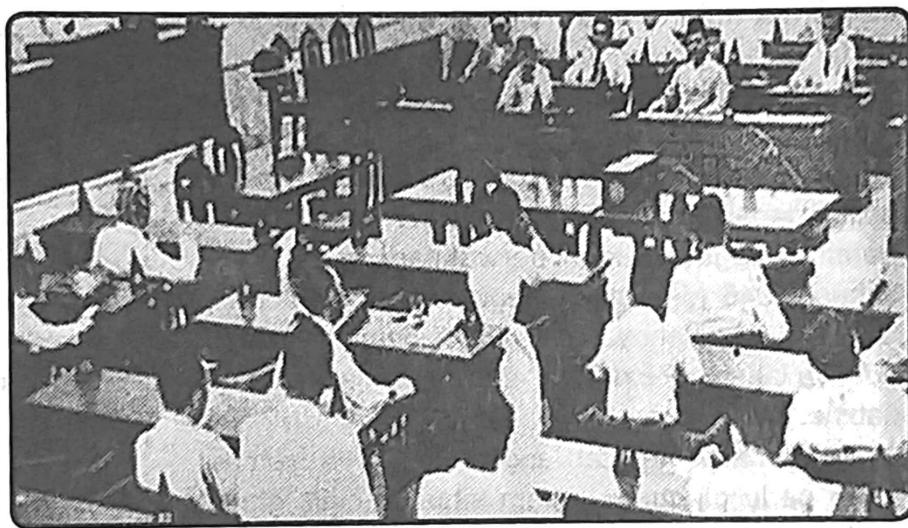
PPKI melanjutkan sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasil sidang ketiga ini merupakan hasil realisasi dari sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945. Adapun hasil keputusannya sebagai berikut.

- 1) Pembentukan Komite Nasional Indonesia yang berpusat di Jakarta KNIP adalah penjelmaan dari tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan

kemerdekaan Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. KNIP berfungsi sebagai DPR sebelum pemilu diadakan. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yakni untuk pusat akan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sedangkan daerah akan dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). KNIP sendiri diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo.

Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam Maklumat Pemerintah RI No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang isinya meliputi hal-hal berikut.

- KNIP sebelum DPR/MPR terbentuk diberi kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
- Berhubung gentingnya keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Sutan Sjahrir dan wakilnya Amir Sjarifuddin.



Sumber: www.liputan6.com

Berlangsungnya sidang PPKI

2) Pembentukan partai-partai politik

Pembentukan partai politik sesuai dengan dikeluarkan Maklumat No. X Tanggal 3 November 1945. Setelah keluarnya maklumat tersebut muncul banyak partai di Indonesia. Bila didasarkan pada ideologinya, akan terdapat kelompok dengan ideologi nasionalis, agamis, sosialis, dan komunis.

- Partai berideologi nasionalis: Partai Nasional Indonesia (PNI).
- Partai berideologi agamis: Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi); Partai Kristen Indonesia; dan Partai Katolik Republik Indonesia.
- Partai berideologi sosialis-komunis: Partai Rakyat Sosialis, Partai Rakyat Jelata, Partai Buruh Indonesia, Partai Persatuan Rakyat Marhein Indonesia; dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

3) Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)

BKR dibentuk dengan tujuan menjamin ketenteraman umum. BKR adalah badan yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan keamanan bersama rakyat dan badan negara yang baru terbentuk setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. BKR dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 dalam sidang PPKI dan diumumkan secara resmi oleh Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945.

BKR terdiri atas para anggota yang berasal dari Peta, Heijo, Selnendar, dan Keiboden. Khusus di Jakarta, dibentuk BKR Pusat di bawah pimpinan Kaprawi yang bertugas untuk mengoordinasi dan mengendalikan BKR daerah. Sementara itu, BKR Jawa Timur dipimpin Dr. Moestopo, BKR Jawa Tengah dipimpin Soedirman, dan BKR Jawa Barat dipimpin Aroedji Kartawinata.

Pemerintah belum membentuk tentara yang bersifat nasional karena pertimbangan politik, mengingat pembentukan tentara yang bersifat nasional akan mengundang sikap permusuhan dari Sekutu dan Jepang. Menurut perhitungan, kekuatan nasional belum mampu menghadapi gabungan Sekutu dan Jepang. Setelah Belanda melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji kepada rakyat Indonesia, maka pemerintah Indonesia berinisiatif membuat suatu badan keamanan negara.

Pembentukan TKR merupakan gagasan dari Oerip Soemoharjo untuk mengorganisasi tentara Indonesia di bawah komando Presiden Soekarno. Pada tanggal 5 Oktober 1945, dikeluarkan maklumat presiden mengenai berdirinya TKR di bawah komando Soepriyadi.

Tonggak awal demokrasi Indonesia dinilai terjadi usai dikeluarkannya Maklumat 3 November 1945. Maklumat itulah yang mendorong terbentuknya partai-partai politik di tanah air. Adapun tujuan maklumat tersebut dikeluarkan sebagai persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946. Dengan maklumat ini, pemerintah berharap supaya partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota badan perwakilan rakyat pada Januari 1946. Maklumat ini juga memiliki arti penting lain, yaitu berubahnya sistem pemerintahan dengan adanya jabatan Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet.

Maklumat pemerintah tanggal 3 dan 14 November 1945 perlu dipahami dalam situasi politik global pada masa itu. Selepas Proklamasi Kemerdekaan, beberapa pihak asing menuduh bahwa RI adalah negara bentukan Jepang. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta juga dituduh sebagai kolaborator Jepang. RI juga dituduh sebagai negara yang fasis, apalagi pada awalnya PNI ditetapkan sebagai partai negara. Sistem partai tunggal seperti itu sering kali dikaitkan dengan ciri negara fasis, seperti pada masa Perang Dunia II. Oleh karenanya, untuk meyakinkan dunia internasional bahwa RI adalah negara yang demokratis dan bukan fasis, pemerintah melakukan beberapa perubahan seperti yang disebutkan dalam kedua maklumat tersebut.

Adanya Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet seperti yang disampaikan dalam Maklumat 14 November 1945 memang tidak sesuai dengan UUD 1945. Akan tetapi, dalam situasi politik saat itu, hal ini merupakan adaptasi yang dilakukan oleh RI dan respons terhadap perkembangan internasional agar pihak asing, terutama Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II, percaya bahwa RI adalah negara yang demokratis dan bukan negara fasis bentukan Jepang. Sebagai negara yang baru merdeka, RI sangat membutuhkan dukungan internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menghadapi ambisi Belanda yang ingin kembali menjajah.

B. Pergolakan di Awal Revolusi

Secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan masih terus terjadi karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela kalau Indonesia merdeka. Kondisi politik Indonesia semakin memanas ketika Belanda datang ke Indonesia dengan memboceng Sekutu untuk menguasai kembali Indonesia. Pertempuran terjadi di berbagai daerah. Hal ini membuat prihatin tokoh-tokoh nasional yang sedang berkumpul di Jakarta. Sesuai

MAKLOEMAT PEMERINTAH

Berhoeboeng dengan oesoel Badan Pekerja Komite Nasional Poesat kepada Pemerintah, soepaja diberikan kesempatan kepada rakjat seloës-löensja oentoek mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi bahwa partai-partai itoe hendakna memperkoat perlöeongan kita niempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat, Pemerintah menegaskan pendirianna jang telah diambil beberapa waktee jang jaloe bahwa:

1. Pemerintah menjoekei timboelnja partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itoelah dapat dipimpin ke dalam jang teratoer segala aliran paham jang ada dalam masjarakat.
2. Pemerintah berharap soepaja partai-partai itoe telah tersoesoen, sabeloënnja dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakjat pada boelan Djanoeari 1946.

Djakarta, tanggal 3 November 1945.

Wakil Presiden,
MOHAMMAD HATTA.

Sumber: surat kabar Berita Republik Indonesia
Maklumat 3 November 1945

konsekuensi dari proklamasi yang menyatakan bahwa pemindahan kekuasaan dilaksanakan dalam tempo yang cepat maka pemerintah berusaha mempertahankan kedaulatan negara.

1. Perebutan Senjata dan Pengambilalihan Kekuasaan dari Pihak Jepang

Pada masa awal kemerdekaan, tentara Jepang yang sudah menyerah masih ada di Indonesia. Tentara Jepang mendapat perintah dari Sekutu untuk menjaga *status quo* sampai mereka tiba di Indonesia. Akan tetapi, pemuda Indonesia melucuti senjata tentara Jepang, merebut persenjataannya, serta menguasai gedung-gedung penting yang dikuasai Jepang.

Tujuan dilakukannya pelucutan persenjataan Jepang adalah untuk mendapatkan modal perang, mencegah senjata Jepang agar tidak jatuh ke tangan Sekutu, dan mencegah agar senjata Jepang tidak digunakan untuk membunuh rakyat. Beberapa peristiwa perebutan senjata didahului oleh konflik atau pengepungan markas dan gudang senjata karena pihak tentara Jepang bersikukuh untuk menjaga *status quo*, seperti yang ditugaskan kepada mereka. Hal ini terjadi di Surabaya, Yogyakarta, Bireun, dan berbagai daerah lainnya.

2. Kedatangan Sekutu dan NICA

Setelah Perang Dunia II, terjadi perundingan Belanda dan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isi Civil Affairs Agreement adalah tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda. Khususnya yang menyangkut daerah Sumatra sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan South East Asia Command (SEAC). Tujuan kedatangan Sekutu dari Komando Asia Tenggara SEAC di bawah komando Lord Louis Mountbatten untuk mempersiapkan pembentukan markas besar pasukan Sekutu di Jakarta. Pada tanggal 29 September 1945, berlabuh kapal penjelajah Cumberland di Tanjung Priok yang membawa Laksamana Muda W.R. Patterson selaku Panglima Skuadron Kapal Penjelajah V Inggris. Pasukan Sekutu yang bertugas di Indonesia diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) berada di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Adapun tugas dan tujuan dari AFNEI sebagai berikut.

- a. Menerima penyerahan dari tangan Jepang.
- b. Membebaskan interniran Sekutu.
- c. Melucuti, mengumpulkan, dan memulangkan orang Jepang.
- d. Menegakkan serta mempertahankan keadaan damai untuk kemudian akan diserahkan kepada pemerintahan sipil.
- e. Menghimpun keterangan mengenai penjahat perang serta menuntut mereka di depan sebuah pengadilan pasukan Sekutu.



Sumber: <https://koranmakassar.com>

Pasukan AFNEI

Pada awal kedatangan, pasukan Sekutu tersebut disambut baik oleh pihak Indonesia. Namun, setelah diketahui bahwa pasukan Sekutu (Inggris) datang dengan membawa orang-orang Belanda yang terkelompok dalam Netherlands Indies Civil Administration atau (NICA),

sikap bangsa Indonesia mulai berubah memusuhi. Situasi keamanan setelah itu menjadi tidak terkendali.

Letnan Jenderal Christison sudah menganalisis bahwa tugas pasukan Sekutu tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dari pemerintah Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Letnan Jenderal Christison kemudian melakukan perundingan dengan pemerintah Republik Indonesia, dan juga mengakui secara *de facto* negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945. Dalam kenyataannya, pernyataan tersebut banyak dilanggarnya.

Sekutu dan NICA berkeinginan untuk menguasai kembali Indonesia meskipun Indonesia telah menyatakan kemerdekaan. Di sisi lain, pasukan Jepang yang sebenarnya sudah menyerah kepada Sekutu berusaha bertindak tegas kepada bangsa Indonesia karena mendapat perintah dari Sekutu untuk menjaga *status quo*. Akibatnya, terjadi berbagai pertempuran di Indonesia. Berikut beberapa contoh perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.

a. Pertempuran Medan Area

Tentara Inggris di bawah komando T.E.D. Kelly mendarat di Medan untuk membebaskan tawanan perang (tentara Belanda). Tentara Inggris yang diboncengi NICA disambut baik oleh pemerintah RI di Sumatra Utara. Pada tanggal 13 Oktober 1945, terjadi insiden seorang tentara NICA yang menginap di hotel Jalan Bali, ia merampas dan mencoreng bendera Merah Putih. Hal tersebut membuat marah para pemuda Medan.

Akibatnya, terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni pasukan NICA. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan "*Fixed Boundaries Medan Area*" di berbagai sudut Kota Medan. Sejak saat itulah, Medan Area menjadi terkenal. Pasukan Inggris dan NICA mengadakan pembersihan terhadap unsur Republik yang berada di Kota Medan.

Hal ini jelas menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali. Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi, diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama "Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area".

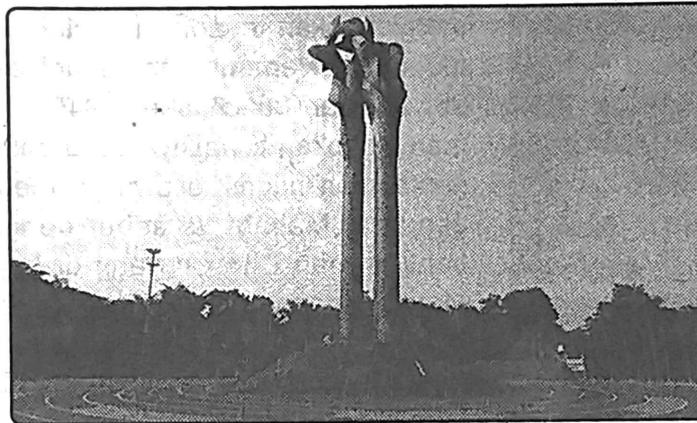
b. Pertempuran Bandung Lautan Api

Pada tanggal 17 Oktober 1945, pasukan Sekutu datang di Bandung yang diboncengi oleh tentara NICA yang ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Namun, semangat juang rakyat dan pemuda Bandung tetap berkobar. Pertempuran besar dan kecil berlangsung terus di Bandung untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia yang baru didirikan. Untuk meredakan ketegangan, diadakan perundingan antara pihak RI dan AFNEI atau Sekutu dan NICA. Hasil perundingan tersebut, Kota Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu Bandung utara diduduki oleh pihak Sekutu, sedangkan Bandung selatan diduduki oleh pemerintah Indonesia.

Pada tanggal 23 November 1945, Sekutu mengultimatum agar pihak Indonesia meninggalkan dan mengosongkan daerah Bandung bagian utara paling lambat tanggal 29 November 1945. Ancaman Sekutu tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang Bandung sehingga timbul pertempuran pada tanggal 1 Desember 1945. Karena persenjataannya yang lebih lengkap, tentara Sekutu berhasil menduduki Bandung bagian utara. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua kepada rakyat Bandung.

Dalam ultimatum yang kedua itu, para pejuang Bandung diminta untuk mengosongkan dan meninggalkan Kota Bandung. Akan tetapi, para pejuang Bandung tidak bersedia

menurut isi ultimatum tersebut. Akibatnya, terjadi pertempuran yang sengit di Bandung bagian selatan sehingga tentara Sekutu terdesak. Karena terdesak, tentara Sekutu meminta bantuan pemerintahan RI untuk menghentikan pertempuran. Pemerintahan RI menyetujui permintaan Sekutu tersebut dan memerintahkan para pejuang Bandung untuk menghentikan pertempuran dan mengosongkan Kota Bandung. Dengan berat hati, para pejuang Bandung meninggalkan kota. Pada saat bergerak mundur, para pejuang Bandung membakar bangunan-bangunan penting di Bandung bagian selatan. Tujuannya agar pihak musuh tidak dapat menggunakan gedung-gedung yang ada di Kota Bandung. Peristiwa itu dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Istilah Bandung Lautan Api merupakan suatu gambaran jiwa rakyat yang rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan Bandung. Mereka rela membakar rumah-rumahnya sendiri daripada dikuasai oleh tentara Sekutu Inggris dan NICA.



Sumber: www.salsawisata.com

Monumen Bandung Lautan Api

c. Pertempuran Pelagan Ambarawa

Pertempuran Ambarawa diawali oleh mendaratnya tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Kedatangan mereka disambut dengan baik oleh masyarakat Semarang karena tujuan mereka adalah untuk mengambil dan mengurus tawanan Jepang. Mereka pun berjanji tidak mengganggu kedaulatan RI. Namun, pertempuran demi pertempuran terjadi antara pasukan TKR dan Pemuda Indonesia melawan pasukan Sekutu (Inggris) di Ambarawa.

Perjuangan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dipimpin Kolonel Soedirman pada pertengahan Desember 1945, membuat tentara Sekutu terjepit dan akhirnya mundur dari Ambarawa menuju Semarang. Kolonel Soedirman sebagai pemimpin TKR menegaskan perlunya mengusir tentara Sekutu dari Ambarawa secepat mungkin. Hal itu disebabkan Sekutu akan menjadikan Ambarawa sebagai basis kekuatan untuk merebut Jawa Tengah.

Pasukan Sekutu mundur dari Ambarawa sambil melancarkan aksi bumi hangus pada tanggal 15 Desember 1945, pukul 17.30 WIB. Pembebasan Ambarawa yang berlangsung selama empat hari empat malam, yaitu tanggal 12 hingga 15 Desember 1945 dilancarkan dengan penuh semangat pantang mundur. Pertempuran berakhir dengan kemenangan gemilang pada pihak TKR. Pasukan TKR berhasil merebut benteng pertahanan Sekutu yang tangguh. Keberhasilan Panglima Besar Jenderal Soedirman ini kemudian diabadikan dalam bentuk Monumen Palagan Ambarawa.

d. Pertempuran Surabaya

Terjadinya perang di Surabaya berawal dari insiden penyobekan bendera di Hotel Yamato. Insiden ini melibatkan para pemuda Surabaya dengan pihak Belanda yang menjadi bekas tawanan perang Jepang. Awal mula insiden ini ketika orang Belanda

mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Hal tersebut membuat marah pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya mencoba menurunkan bendera Belanda dengan cara memanjat dinding hotel. Mereka merobek bendera biru Belanda sehingga yang tersisa hanya warna Merah dan Putih. Konflik tersebut kemudian berkembang menjadi perseteruan antara pemuda Surabaya dan Sekutu dengan melakukan perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang. Pertempuran itu telah dimulai sejak tanggal 2 September 1945. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di Surabaya yang bertujuan untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan interniran Sekutu.



Sumber: <https://upload.wikimedia.org>
A.W.S. Mallaby

Pada tanggal 27 Oktober 1945, Inggris menyebarkan pamflet yang berisi ancaman terhadap rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang, sehingga menyebabkan terjadinya kontak senjata antara Inggris dan Indonesia. Pertempuran itu meluas sampai dengan tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 1945. Pertempuran di Surabaya menyebabkan tewasnya Jenderal A.W.S. Mallaby sehingga pemerintah Inggris kecewa dan menuntut balas atas kematian Jenderal Mallaby tersebut dengan mendatangkan bala bantuan dari Divisi V yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Mansergh dengan 24.000 orang anak buahnya mendarat di Surabaya. Pada tanggal 9 November 1945, pihak AFNEI mengeluarkan ultimatum yang melecehkan martabat rakyat

Indonesia. Isi ultimatum itu sebagai berikut.

- 1) Pihak AFNEI menuntut balas atas kematian Jenderal Mallaby yang menjadi tanggung jawab rakyat Surabaya.
- 2) Menginstruksikan unsur pimpinan pemerintahan, pemuda, keamanan, dan masyarakat untuk melapor, menyerahkan senjata, meletakkan tangan di atas kepala, dan menandatangi penyerahan tanpa syarat.

Ultimatum tersebut disertai dengan adanya ancaman dari Sekutu akan menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila rakyat Surabaya tidak menjalankan instruksi sampai batas waktu yang ditentukan, yakni tanggal 10 November 1945 pukul 6.00 WIB. Pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya, suasana menjadi hening sebab diberondong peluru dan dibombardir dari darat, laut, dan udara. Rakyat Surabaya berhasil mempertahankan Surabaya selama tiga minggu walaupun mereka menggunakan senjata yang sangat sederhana.

Pertempuran di Surabaya terjadi begitu sengit. Untuk mengobarkan semangat para pejuang, Bung Tomo mendirikan Radio Pemberontakan untuk mengobarkan semangat arek-arek Surabaya. Bung Tomo memimpin perlawanan pejuang melalui pidato-pidatonya. Bung Tomo berpidato dengan semangat yang membara dan selalu meneriakkan takbir di akhir atau awal berpidato. Tokoh lain, misalnya, Ktut Tantri, yakni wanita Amerika yang juga aktif dalam mengumandangkan pidato-pidato revolusinya dalam bahasa Inggris melalui Radio Pemberontakan Bung Tomo.

e. Pertempuran Palembang

Pertempuran lima hari lima malam di Palembang, Sumatra Selatan, terjadi dari tanggal 1 hingga 5 Januari 1947. Ini merupakan salah satu rangkaian peristiwa sejarah perang mempertahankan kemerdekaan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Setelah proklamasi, Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membongkong pasukan Sekutu. Belanda memakai nama baru, yaitu Netherland Indies Civil Administration (NICA) dan berambisi ingin kembali menguasai Indonesia. Kembalinya Belanda memulai

periode yang disebut sebagai masa revolusi fisik atau masa perang mempertahankan kemerdekaan dari tahun 1945 hingga 1949. Terjadilah rangkaian upaya diplomasi dan pertempuran termasuk Perang 5 Hari 5 Malam di Palembang.

Kedatangan NICA atau Belanda yang dipimpin oleh Hubertus Johannes van Mook berkedok melucuti senjata sisa-sisa serdadu Jepang dan mengumumkan konsepsi negara Indonesia. Kehadiran Belanda dan Sekutu disambut dengan munculnya perlawanan oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah yang bertekad mempertahankan kemerdekaan. Tanggal 12 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Carmichael mendarat di Palembang bersama pasukan NICA atau Belanda. Sekutu kemudian meninggalkan Palembang pada 1946, yang kemudian kedudukan mereka di Palembang diserahkan kepada tentara Belanda. Konflik bermula saat Belanda ingin Palembang segera mengosongkan kotanya. Akan tetapi, keinginan Belanda ditolak oleh seluruh rakyat Palembang. Belanda ingin menguasai Palembang, karena Palembang merupakan salah satu wilayah strategis Indonesia. Selain itu, Palembang juga kaya akan sumber daya alamnya. Palembang juga berpotensi sebagai pusat pemerintahan, kekuatan militer, dan kegiatan politik maupun ekonomi.

Palembang menolak permintaan Belanda. Baku tembak terjadi pada tanggal 1 Januari 1947 di Palembang Ilir. Belanda menyerang markas Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) di Jalan Tengkuruk. Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam pertempuran ini adalah Kolonel Maludin Simbolon, Letkol Bambang Utomo, Mayor Rasyad Nawawi, dan Kapten Alamsyah. Pada hari pertama, setelah menyerang BPRI, para pejuang Palembang menyerbu dan mengepung pasukan Belanda yang bertahan di sektor yang mereka kuasai sebelumnya. Pusat pertahanan Belanda ada di Benteng Kuto Besak, RS Charitas, dan Bagus Kuning (Plaju). Sedangkan pejuang Palembang tersebar secara merata di setiap tempat pertahanan Belanda. Pertempuran pertama berakhir pukul 5 sore. Namun, menjelang malam, pasukan Belanda kembali menyerang menggunakan senjata lapis baja. Serangan ini mengakibatkan beberapa tempat strategis dikuasai oleh Belanda, seperti kantor residen, kantor wali kota, dan kantor pos. Pada hari kedua dan ketiga, Belanda kembali menyerbu pusat pertahanan tentara di area Masjid Agung Palembang. Akan tetapi, serangan mereka berhasil digagalkan oleh Pasukan Batalion Geni bersama sejumlah tokoh masyarakat. Sementara itu, dari arah Talang Betutu, pasukan bantuan Belanda yang hendak bergabung ke dalam Masjid Agung berhasil disergap oleh pejuang Palembang, dipimpin Lettu Wahid Luddien. Pada hari keempat, bala bantuan untuk pejuang Palembang tiba dari Lampung, dipimpin komando Mayor Noerdin Pandji dan Letjen Harun Sohar. Menjelang hari kelima, setelah kekurangan pasokan logistik dan amunisi, kedua belah pihak memutuskan bertemu. Keduanya kemudian memilih untuk melakukan gencatan senjata.

f. Pertempuran Puputan Margarana

Puputan Margarana adalah sebuah peristiwa sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali. Dalam ajaran agama Hindu, kata puputan sendiri mengandung makna moral, karena kematian seorang prajurit dalam kondisi berperang adalah sebuah kehormatan bagi keluarganya.

Perang Puputan Margarana di Bali disebabkan oleh hasil Perjanjian Linggajati antara Belanda dan Indonesia. Dalam Perjanjian Linggajati, salah satu isinya menyebutkan bahwa pengakuan Belanda secara *de facto* atas eksistensi Negara Republik Indonesia

Pendidikan Antikorupsi



Perselisihan terjadi bukan karena adanya perbedaan, tetapi karena ada pihak yang tidak mendengarkan dengan baik, dan tidak menghargai dengan sempurna.

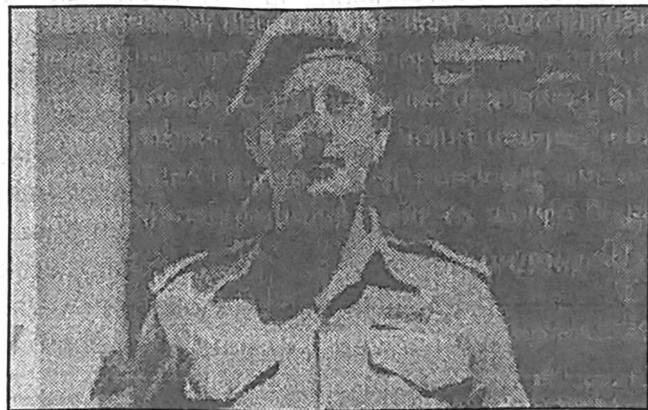
hanya meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. Pada tanggal 2 Maret 1946, Belanda datang ke Bali untuk melucuti senjata Jepang. Kedatangan Belanda membuat situasi di Bali menjadi tidak aman. Belanda melakukan politik *divide et impera* untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Dalam situasi demikian, I Gusti Ngurah Rai melakukan perlawanan kepada Belanda.

Pada tanggal 19 November 1946, pasukan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai berhasil merebut senjata prajurit NICA di Tabanan. Pihak Belanda melakukan serangan balik dan mengepung Desa Marga. Pertempuran tidak terelakkan sehingga I Gusti Ngurah Rai beserta seluruh pasukannya gugur dalam peristiwa tersebut. Mereka bertempur sampai titik darah penghabisan.

Akibat kekalahan pasukan I Gusti Ngurah Rai pada Puputan Margarana, Belanda semakin mudah dalam melaksanakan tugasnya untuk mendirikan Negara Indonesia Timur (NIT). Dalam peristiwa heroik itu, I Gusti Ngurah Rai dan 69 anggota pasukannya gugur akibat serangan tentara Belanda. Sedangkan di kubu lawan, sekitar 400 orang tewas dalam peperangan itu.

g. Pertempuran Makassar

Peristiwa di Makassar terjadi pada Desember 1946 hingga Februari 1947, selama operasi militer penumpasan pemberontakan atau *counter insurgency*. Hal ini menjadi salah satu ujian kemerdekaan Indonesia, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia usai perginya Jepang. Upaya Belanda untuk merebut kembali Indonesia pada 1940-an saat itu disebut sebagai 'tindakan pengawasan' terhadap 'teroris' dan 'ekstremis' nasionalis.



Sumber: <https://kompas.com>

Raymond Westerling

Pasukan NICA dan KNIL melakukan tindakan semena-mena yang menyebabkan para pemuda di Makassar terutama yang tergabung dalam Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI) geram. Pada tanggal 27 Oktober 1945, mereka mulai melakukan serangan dan merebut lokasi-lokasi strategis yang dikuasai NICA. Pertempuran kembali terjadi keesokan harinya. Dalam situasi konflik, sebagai bagian dari pihak Sekutu, tentara Australia membantu NICA. Awal Desember 1945, satu kompi pasukan KNIL pro-RI yang baru datang dari Morotai mendarat di Makassar. Mereka bergabung dengan pemuda dan pelajar RI untuk melakukan perlawanan kepada Belanda pada tanggal 5–9 Desember 1945. Namun, usaha ini digagalkan oleh pasukan Sekutu. Meskipun demikian, berbagai perlawanan tetap berlangsung di Makassar dan sekitarnya hingga pihak Belanda menurunkan pasukan khusus di bawah Kapten Westerling. Strategi Westerling sangat mengerikan dan memakan banyak korban jiwa. Sebagian besar korban kekejaman Westerling dan pasukannya adalah warga sipil. Sampai saat ini terdapat beberapa versi mengenai jumlah korban Westerling di Sulawesi Selatan. Jumlah yang sering beredar dan

digunakan sebagai sumber propaganda oleh pemerintah RI di masa Revolusi Nasional adalah 40.000 korban jiwa berdasarkan laporan dari Kahar Muzakkir.

Pada tahun 2012, para keluarga korban Westerling di Sulawesi Selatan membawa kasusnya ke pengadilan sipil di Den Haag untuk menuntut keadilan. Setelah menunggu sekitar 8 tahun, akhirnya para keluarga korban memenangkan kasus ini dan pemerintah Belanda diwajibkan untuk membayar kompensasi. Pemerintah Belanda meminta maaf kepada para keluarga korban.

Aktivitas Mandiri

Kerjakan sesuai perintahnya!

Raymond Westerling dikirim ke Jawa dan membentuk pasukan khusus baret hijau yang disebut Depot Speciale Troepen (DST). Pasukan yang berkekuatan 123 orang kemudian dikirim ke Sulawesi Selatan untuk melakukan operasi militer. Westerling menggunakan cara yang kejam. Ia melakukan pembantaian terhadap masyarakat Sulawesi Selatan yang dituduh sebagai pemberontak. Mereka tak segan membunuh para terdakwa yang baru diduga sebagai pemberontak. Aksi pembersihan ini dilakukan pada tanggal 11 Desember 1946 hingga tanggal 17 Februari 1947. Pada tahun 2013, Belanda secara resmi meminta maaf kepada keluarga korban pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan. Buatlah resume mengenai permintaan maaf pihak Belanda atas kekerasan yang dilakukan di Indonesia. Kerjakan di buku tugas Anda. Hasilnya kumpulkan kepada guru untuk mendapat penilaian.

C. Perjuangan Diplomasi dan Gerilya

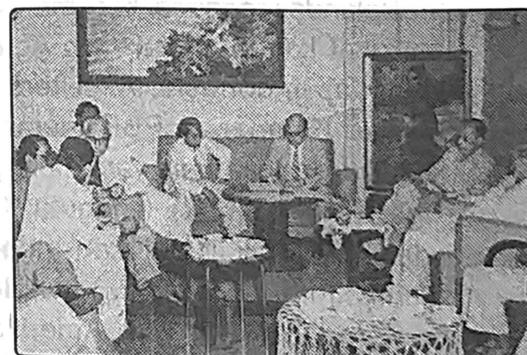
Diplomasi adalah metode untuk memengaruhi keputusan masyarakat melalui dialog, negosiasi, dan tindakan sejenis tanpa kekerasan atau perang. Melalui perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia berupaya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih bangsa Indonesia pantas untuk dibela dan dipertahankan. Berikut ini beberapa perjuangan diplomasi yang telah dilakukan Indonesia.

1. Perundingan Linggajati

Perundingan Linggajati berlangsung pada tanggal 10–15 November 1946 dan ditandatangani secara resmi pada tanggal 25 Maret 1947. Delegasi Indonesia dalam perundingan ini dipimpin oleh Sutan Sjahrir, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh H.J. van Mook.

Hasil dari perjanjian Linggajati sebagai berikut.

- Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara *de facto* pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatra. Daerah-daerah yang diduduki Sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada RI.
- Akan dibentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia) sebagai negara berdaulat.
- Pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh raja Belanda.
- Pembentukan NIS dan Uni Indonesia-Belanda diusahakan sudah selesai sebelum tanggal 1 Januari 1949.
- Pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing.



Sumber: www.kompas.com
Perjanjian Linggajati

- f. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara.
- g. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase.

Naskah persetujuan kemudian diparaf oleh kedua delegasi di Istana Rijswijk, Jakarta (sekarang Istana Merdeka). Isi perundingan itu harus disahkan dahulu oleh parlemen masing-masing (Indonesia oleh KNIP). Akhirnya isi Perundingan Linggajati disahkan oleh KNIP pada tanggal 25 Maret 1947, yang lebih dikenal sebagai tanggal Persetujuan Linggajati.

2. Agresi Militer Belanda I

Agresi Militer Belanda I atau *operatie product* adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatra terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Agresi Militer Belanda I merupakan upaya Belanda untuk merebut wilayah Indonesia melalui serangan pasca disetujuinya Perjanjian Linggajati pada 25 Maret 1947.

Agresi Militer Belanda I mendapat tentangan dari dunia internasional. Agresi Militer Belanda I dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang bertujuan memulihkan ekonomi Belanda pasca Perang Dunia II dengan menguasai kekayaan alam dari Indonesia. Belanda memiliki tafsiran tersendiri terhadap Perjanjian Linggajati yang digunakan dasar melakukan serangan kepada Indonesia. Dari pernyataan inilah, Belanda kemudian mengabaikan seruan dunia internasional untuk menaati Perjanjian Linggajati. Atas perintah van Mook, Belanda mengultimatum untuk menarik pasukan Indonesia sejauh 10 kilometer dari garis demarkasi. Namun, ultimatum ini ditolak oleh pihak Indonesia.

Tidak hanya mengultimatum, van Mook juga menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan Perjanjian Linggajati. Belanda kemudian melancarkan serangan secara mendadak menggunakan kekuatan militer yang modern. Keadaan yang berbeda dialami Indonesia di mana Indonesia tidak dapat menandingi kekuatan Belanda. Akhirnya, Belanda dapat menguasai Jawa dan Sumatra terlebih wilayah ibu kota Jakarta dikuasai Belanda. Agresi yang dilakukan Belanda mendapat kecaman dari dunia internasional termasuk Amerika Serikat dan Inggris.

3. Perjanjian Renville

Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional karena melakukan Agresi Militer Belanda I terhadap Indonesia. Aksi tersebut menyebabkan Dewan Keamanan PBB membentuk suatu badan komisi jasa-jasa baik yang kemudian disebut Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN yang dimaksud adalah Australia (tunjukan Indonesia) diwakili oleh Richard Kirby; Belgia (tunjukan Belanda) diwakili oleh Paul van Zeeland; dan Amerika Serikat (tunjukan Australia dan Belgia) diwakili Dr. Frank Graham. Tugas KTN adalah menguasai dengan cara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi PBB; menjadi penengah konflik Indonesia-Belanda; memasang patok-patok wilayah *status quo* yang dibantu oleh TNI; dan mempertemukan kembali Indonesia serta Belanda dalam Perundingan Renville.

Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin, sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo,

Sekilas Info

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Untuk mengetahui lebih lanjut, Anda dapat melakukan pindai QR Code di bawah ini.

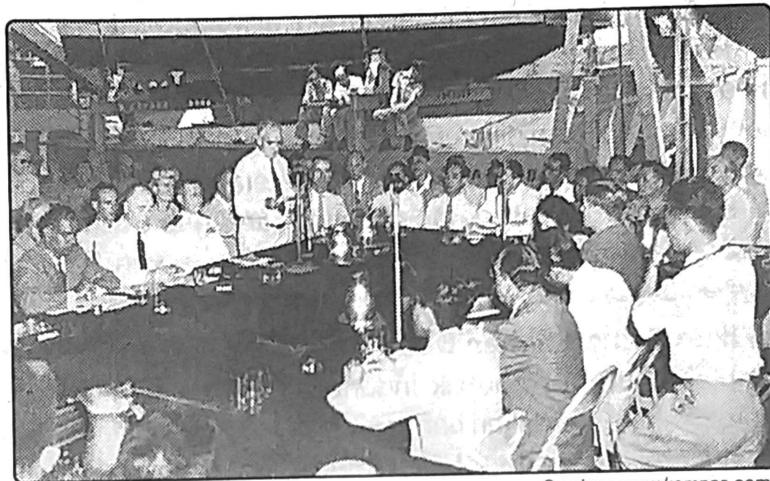


dan dari KTN sebagai mediator, yaitu Dr. Frank Graham. Hasil perundingan berisi sebagai berikut.

- a. Wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis van Mook).
- b. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai RIS terbentuk.
- c. Kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda.
- d. RI merupakan bagian dari RIS.
- e. Pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI.

Penandatanganan naskah perjanjian Renville memunculkan dampak kurang baik bagi pemerintahan Republik Indonesia sebagai berikut.

- a. Wilayah Republik Indonesia menjadi makin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda.
- b. Timbulnya reaksi kekerasan di kalangan para pemimpin Republik Indonesia yang berdampak pada jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin sebab dianggap menjual negara terhadap Belanda.



Sumber: www.kompas.com

Perjanjian Renville

Konsekuensi Perjanjian Renville berdampak sangat besar bagi Indonesia. Wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Dari segi militer, sebagai bentuk kepatuhan kepada politik negara, Jenderal Soedirman memerintahkan gencatan senjata kepada angkatan perang RI dan melakukan hijrah. Tentara Indonesia yang berada di Jawa Barat melakukan perjalanan ke daerah Jawa Tengah. Sekitar 30.000 pasukan Siliwangi diperkirakan ikut ambil bagian dalam peristiwa yang dikenal sebagai *long march* Siliwangi. Hal ini memunculkan banyak kekecewaan dan menyebabkan terjadinya perlawanan di berbagai daerah. Perdana Menteri Amir Sjarifuddin mundur dari jabatannya pada tanggal 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan kedaulatan wilayah. Kabinet Amir Sjarifuddin kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Namun, di bawah pemerintahan Hatta muncul banyak rongrongan dan salah satunya dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin dengan organisasinya yang bernama Front Demokrasi Rakyat. Puncak dari pergolakan itu adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Keadaan seperti itu dimanfaatkan pihak Belanda untuk melancarkan Agresi Militer II.

4. Agresi Militer Belanda II

Pada hari pertama Agresi Militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke ibu kota RI di Yogyakarta. Tanggal 18 Desember 1948, siaran radio Antara dari Jakarta menyebutkan bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Beel, akan mengucapkan pidato yang penting. Sementara itu, Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI

memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatra untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik. Operasi tersebut dinamakan "operatie kraai".

Seiring dengan penyerangan terhadap bandar udara Maguwo, pagi hari tanggal 19 Desember 1948, W.T.M. Beel berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatra, termasuk serangan terhadap ibu kota RI, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai "Aksi Polisional". Penyerangan terhadap ibu kota Republik, diawali dengan pemboman lapangan terbang Maguwo, di pagi hari. Pertahanan pangkalan hanya diperkuat dengan satu kompi TNI bersenjata lengkap. Pesawat Dakota menerjunkan pasukan KST Belanda di atas Maguwo. Pertempuran merebut Maguwo hanya berlangsung singkat. Bandara Maguwo telah jatuh ke tangan pasukan Kapten Eekhout.

Pada pagi hari, seluruh anggota pasukan KST telah mendarat di Maguwo. Seluruh kekuatan grup tempur dari Brigade T beserta persenjataan beratnya di bawah pimpinan Kolonel D.R.A. van Langen telah terkumpul di Maguwo dan mulai bergerak ke Yogyakarta. Serangan terhadap Kota Yogyakarta juga dimulai dengan pemboman serta menerjunkan pasukan payung di kota. Di daerah-daerah lain di Jawa, antara lain di Jawa Timur, dilaporkan bahwa penyerangan telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember malam hari. Segera setelah mendengar berita bahwa tentara Belanda telah memulai serangannya, penyerbuan ini membuat Presiden Soekarno, Moh. Hatta, dan Agus Salim ditahan. Sebelum tertangkap, Presiden Soekarno mengirimkan pesan ke Sjafruddin Prawiranegara untuk membuat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatra.

5. Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) memiliki peran penting dalam upaya mempertahankan Kemerdekaan bangsa Indonesia. PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI disebut juga dengan Kabinet Darurat yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Sistem pemerintahan PDRI berada di Sumatra Barat karena ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap sehingga terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia.

Sebelum ditangkap, Soekarno dan Moh. Hatta menggelar rapat dan memberikan mandat kepada Sjafruddin Prawiranegara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk pemerintahan sementara. Mendengar ibu kota lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, Sjafruddin Prawiranegara bersama Kol. Hidayat, panglima tentara dan teritorium Sumatra mengunjungi Teuku Mohammad Haasan, Gubernur Sumatra di kediamannya untuk mengadakan perundingan. Kemudian mereka langsung menuju Halaban, perkebunan teh yang berjarak 15 kilometer di selatan Kota Payakumbuh. Di sana, mereka mengadakan rapat dengan sejumlah tokoh pada 22 Desember 1948. Kemudian mereka membentuk PDRI. Sejak saat itu, PDRI menjadi musuh nomor satu Belanda dan tokoh-tokoh PDRI diburu Belanda. Mereka harus menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda.

Keberadaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ternyata diakui di dalam dan luar negeri. Kalangan pejabat tinggi TNI, seperti Jenderal Soedirman, Kolonel A.H. Nasution, dan T.B. Simatupang segera mengirim telegram ke Sumatra menyatakan bahwa mulai saat itu tentara Republik tunduk kepada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Sementara itu, kontak-kontak Pemerintahan Darurat Republik Indonesia via India ke dunia internasional telah menyebabkan semua negara (kecuali Belgia) mengecam tindakan Belanda di Indonesia.

Kedudukan PDRI tersebut mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu berupa radiogram yang dikirim Presiden dan Wakil Presiden sehingga PDRI menggantikan kedudukan pemerintahan Soekarno/Hatta dan legalitasnya mempunyai dasar yang kuat. Eksistensi PDRI disokong penuh oleh rakyat dan tentara yang bergerilya melawan Belanda.

Semakin lama kedudukan PDRI makin kuat. Demikian pula kedudukan militer di Jawa. Sedangkan perjuangan diplomasi di tingkat internasional mendatangkan simpati. Dua hari seusai Belanda menyerang Yogyakarta, Sri Lanka menutup pelabuhan udaranya untuk kapal terbang Belanda. India dan Pakistan kemudian mengikuti sikap Sri Lanka. Liga Arab di Kairo mengajukan imbauan pada Australia, Birma, Ethiopia, Filipina, India, Iran, Irak, Lebanon, Mesir, Pakistan, Saudi Arabia, Sri Lanka, Siria, Yaman sebagai peserta penuh; kemudian Tiongkok, Nepal, Selandia Baru, dan Siam sebagai peninjau.

6. Perlawanan Gerilya

Setelah terjadi Agresi Militer Belanda II, Soedirman meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin gerilya dari luar kota. Perjalanan bergerilya selama delapan bulan ditempuh kurang lebih 1.000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Soedirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Soedirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949.

Kolonel A.H. Nasution, selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat No. 1. Salah satu pokok isinya adalah tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal adalah ber-wingate (menyusup ke belakang garis musuh) dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas.

7. Serangan Umum 1 Maret 1949

Jatuhnya ibu kota RI ke tangan Belanda membuat para pemimpin Indonesia berunding untuk merebut kembali Kota Yogyakarta. TNI berencana untuk memukul Belanda yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949. Serangan Umum 1 Maret dipimpin oleh Letkol Soeharto yang menggunakan taktik serangan dari berbagai arah. Untuk mempermudah koordinasi penyerangan, maka wilayah serangan dibagi menjadi beberapa sektor berikut.

- a. Sektor barat dipimpin Letkol Ventje Sumual.
- b. Sektor selatan dan timur dipimpin oleh Mayor Sarjono.
- c. Sektor utara dipimpin Mayor Kusno.
- d. Sektor kota dipimpin oleh Kapten Amir Murtono dan Letnan Marsudi.



Sumber: <https://radarmukomuko.com>
Soeharto

Belanda tidak menduga akan mendapat serangan sehingga tidak sempat melakukan koordinasi untuk menahan serangan. Dalam waktu yang singkat, TNI berhasil memukul semua posisi pasukan Belanda. Serangan Umum ini akhirnya berhasil menduduki Yogyakarta selama enam jam. Tanggal 2 Maret 1949, peristiwa Serangan Umum 1 Maret dilaporkan oleh R. Sumardi kepada pemerintah PDRI di Bukittinggi melalui radiogram, yang kemudian juga disampaikan kepada Maramis, Diplomat RI di New Delhi India dan L.N. Palar, Diplomat RI di New York, Amerika Serikat. Serangan Umum 1 Maret mempunyai arti penting, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun pengaruh Serangan Umum 1 Maret 1949 tersebut sebagai berikut.

- a. Bagi Indonesia, pengaruh Serangan Umum 1 Maret sebagai berikut.
 - 1) Mendukung perjuangan diplomasi.
 - 2) Meninggikan semangat rakyat dan TNI yang sedang bergerilya.
 - 3) Memengaruhi sikap para pemimpin negara federal (BFO) yang semula mendukung setiap tindakan Belanda menjadi berbalik bersimpati terhadap RI.
- b. Bagi dunia, pengaruh Serangan Umum 1 Maret sebagai berikut.
 - 1) Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada dan mampu mengadakan serangan.
 - 2) Mematahkan moral pasukan Belanda.

8. Perjanjian Roem-Roijen

Perjanjian Roem-Roijen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Akhirnya, diperoleh kesepakatan yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949. Berikut isi kesepakatan tersebut.

- a. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan.
- b. Pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta.
- c. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.

9. Konferensi Inter-Indonesia

Sebelum Konferensi Meja Bundar berlangsung, dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan negara-negara bagian (BFO), terutama berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Konferensi Inter-Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesamaan pandangan menghadapi Belanda dalam KMB.

Konferensi Inter-Indonesia I diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19–22 Juli 1949. Konferensi Inter-Indonesia I dipimpin Mohammad Hatta. Konferensi Inter-Indonesia II diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli–2 Agustus 1949. Konferensi Inter-Indonesia II dipimpin oleh Sultan Hamid (Ketua BFO).

Pembicaraan dalam konferensi tersebut difokuskan pada pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Keputusan yang cukup penting adalah akan dilakukan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat tanpa ikatan politik dan ekonomi. Pada bidang pertahanan, diputuskan bahwa Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional, TNI menjadi inti dari pasukan APRIS, dan setiap negara bagian tidak boleh memiliki angkatan perang sendiri.

10. Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh Hatta beserta anggotanya, yakni Moh. Roem, Soepomo, Leimena, Ali Sastroamidjojo, Djuanda, Soekiman, Suyono, Hadinoto, Soemitro Djojohadikusumo, Abdul Karim, Pringgodigdo, T.B. Simatupang, dan Sumardi. Sementara dari BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak. Adapun Belanda diwakili oleh van Maarseven. KMB diawasi United Nations Commission for Indonesia (UNCI) yang dipimpin oleh Chritchley (Australia).

Konferensi Meja Bundar menghasilkan beberapa dokumen penting, yaitu Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, kesepakatan ekonomi, kesepakatan terkait sosial, dan militer. Berikut ini hasil Konferensi Meja Bundar.

- a. Belanda menyerahkan kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949.
- b. Masalah Papua Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan.
- c. Dibentuknya Uni Indonesia-Belanda dengan pimpinan kerajaan Belanda sebagai kepala negara.
- d. Kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan kapal perang kecil akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.
- e. Pengambilalihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.

- f. Diadakan pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat pada 16 Desember 1949 untuk menindaklanjuti KMB.
- g. Ir. Soekarno terpilih menjadi Presiden RIS dan dilantik pada 17 Desember 1949. Tiga hari kemudian, Presiden Soekarno membentuk kabinet RIS dengan Mohammad Hatta sebagai menterinya.
- h. Di sisi lain, penyerahan dan penerimaan kedaulatan disepakati dilakukan di dua tempat, yakni Den Haag dan Jakarta pada 27 Desember 1949. Tanggal tersebut menjadi tanggal penting mengingat Kedaulatan Indonesia diakui pertama kali secara *de jure* oleh Belanda.



Sumber: www.x.com

Delegasi RI di Konferensi Meja Bundar

D. Perubahan dari RIS (Republik Indonesia Serikat) Menuju NKRI

Belanda tidak begitu saja melepaskan Indonesia sebagai negara merdeka dan melakukan berbagai upaya untuk kembali menguasai Indonesia. Pengagas pendirian Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. H.J. van Mook. Pembentukan RIS sebagai upaya Belanda untuk dapat menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Pada tanggal 16 Desember 1949, Ir. Soekarno dipilih sebagai Presiden RIS dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden RIS sekaligus sebagai Perdana Menteri RIS. Kedua tokoh tersebut dilantik pada tanggal 17 Desember 1949 di Keraton Yogyakarta. Pada tanggal 20 Desember 1949, Kabinet RIS yang dipimpin oleh Perdana Menteri Drs. Mohammad Hatta dilantik. Pada tanggal 21 Desember 1949, pemerintah RIS menyusun delegasi untuk menerima kedaulatan di Negeri Belanda yang diketuai oleh Perdana Menteri Drs. Mohammad Hatta. Pada tanggal 23 Desember 1949, delegasi ini berangkat ke Negeri Belanda. Upacara pengakuan kedaulatan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949 di Belanda dan di Indonesia. Dalam upacara pengakuan kedaulatan di Negeri Belanda, pihak RIS diwakili oleh Mohammad Hatta. Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen secara langsung menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada Drs. Mohammad Hatta. Pada saat yang sama, di Istana Merdeka Jakarta juga diadakan upacara pengakuan kedaulatan. Pihak Belanda diwakili oleh Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink dan Indonesia diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono IX.

Sistem pemerintahan RIS adalah demokrasi parlementer dengan konstitusi negara bernama Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan RI berada di dalam wilayah pemerintahan RIS, tetapi wilayah RI tetap otonom dan tidak tergantung kepada RIS. Namun, mayoritas masyarakat Indonesia beserta tokoh-tokoh nasional menginginkan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Selain itu, muncul gerakan-gerakan persatuan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menentang pembentukan negara federal, termasuk juga dari masyarakat di mayoritas negara bagian RIS. Negara bagian Sumatra Selatan

adalah yang pertama mengawali untuk bergabung dengan Pemerintah RI pada 10 Februari 1950. Selanjutnya, Negara Pasundan berkeinginan untuk ikut bergabung karena merasa kurang mampu memelihara keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Negara Pasundan akhirnya bergabung dalam RI sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan RIS No. 113 tanggal 11 Maret 1950. Pemerintah RIS tidak menentang aksi penggabungan dengan RI dan justru mengikuti kemauan Majelis Permusyawaratan. Pemerintah RIS kemudian mengeluarkan undang-undang darurat pada 7 Maret 1950 yang isinya pembubaran negara-negara bagian dan penggabungan ke dalam RI. Akhirnya sampai akhir Maret 1950, tinggal empat negara bagian yang masih berdiri, yaitu Kalimantan Barat, Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, dan RI. Kondisi tersebut membuat Natsir berinisiatif menyampaikan agar RI dan negara-negara bagian RIS berbaur dalam NKRI. Usul tersebut disampaikan dalam sebuah rapat parlemen pada tanggal 3 April 1950.



Sumber: www.indonesiazamandloe.com

Dr. H.J. van Mook
Pencetus Republik Indonesia Serikat (RIS)

E. Peran Rakyat dan Revolusi Nasional

Revolusi Nasional atau Revolusi Kemerdekaan adalah peristiwa penting yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Banyak pihak yang mencoba merebut kembali kekuasaan di Indonesia, termasuk Belanda dibantu Inggris dan pasukan Sekutu. Kondisi ini menyebabkan perang di berbagai wilayah Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan.

Dengan semboyan "Merdeka atau Mati", rakyat Indonesia rela bertaruh nyawa dan bahu-membahu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut berbagai peran masyarakat Indonesia pada masa Revolusi Nasional.

1. Peran Perempuan

Terkait masa Revolusi Nasional, perempuan Indonesia sebelumnya tergabung di Fujinkai. Fujinkai merupakan organisasi yang didirikan oleh Jepang yang menghimpun wanita Indonesia untuk keperluan Perang Asia Timur Raya. Ketika organisasi ini bubar, kaum perempuan membentuk organisasi baru. Melalui persekutuan di organisasi baru tersebut, kaum perempuan Indonesia ikut serta dalam perjuangan Revolusi Nasional pasca-kemerdekaan. Sejumlah perannya mencakup bidang kesehatan dan medis, pendidikan, serta dapur umum atau logistik.

a. Peran Medis dan Kesehatan

Perang yang terjadi di masa Revolusi Nasional ditunjang oleh tenaga medis dan kesehatan dari perempuan-perempuan Indonesia. Dalam konflik mempertahankan kemerdekaan negara, terdapat sejumlah perempuan Aceh yang bertugas mengobati korban perang. Di Sulawesi Utara terjadi perjuangan menjebol pertahanan Belanda demi memperoleh obat-obatan perang. Peran serupa juga dilakukan oleh anggota

perempuan palang merah di Bali. Mereka menjalin kontak rahasia dengan rekan di kota-kota untuk menyalurkan bantuan ke desa dan daerah gerilya. Dengan keterampilannya, para perempuan Bali meramu berbagai tanaman obat untuk mengatasi kekurangan obat-obatan. Di Indonesia timur, para perempuan Maluku juga berperan aktif sebagai tenaga sukarela di berbagai rumah sakit sebagai tenaga perawat. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang membantu perjuangan di Jawa. Pada masa Agresi Militer Belanda, para tenaga medis dari Maluku ini tercatat bertugas memeriksa para pengungsi yang berpindah dan datang ke Yogyakarta.

b. Pendidikan

Pada November 1945, di Tondano, Sulawesi Utara, didirikan Yayasan Pendidikan Bangsa. Yayasan yang didirikan oleh perempuan inilah yang nantinya membentuk sekolah bernama Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan (SMRK). Selain itu, ada juga beberapa perempuan Aceh yang mendapatkan tugas untuk mendidik penerus bangsa. Perempuan yang ditugaskan memberantas angka buta huruf ini sudah terlatih di bidang intelejen, fisik, hingga nasionalismenya.

c. Dapur Umum dan Logistik

Dalam peperangan mempertahankan kemerdekaan, keberadaan makanan dan logistik diperlukan untuk menjaga kestabilan fisik pejuang. Untuk memenuhi keperluan tersebut, sejumlah perempuan mendirikan dapur umum di lokasi/markas. Selain itu, terdapat juga perjuangan menggalang dana logistik yang terjadi di Aceh. Mereka mengumpulkan uang dari barang berharganya demi bisa menutupi kebutuhan para pejuang. Di Maluku, para istri dan remaja putri Barisan Pejuang Indonesia mendirikan dapur umum untuk menyediakan makanan serta tempat tinggal bagi para pejuang dan pengungsi. Para istri ini juga menjadi tulang punggung untuk menafkahi keluarga di saat suami mereka berperang di garis depan.

2. Peran Seniman dan Sastrawan

Selama ini, peran pahlawan yang bergerak di bidang politik dan militer mempunyai porsi yang lebih banyak diungkapkan dibandingkan dengan pahlawan yang bergerak di bidang lain, khususnya di bidang seni. Padahal para seniman di masa itu juga mempunyai peran yang cukup penting. Sebagai bentuk ekspresi diri, karya para seniman di masa kemerdekaan membangkitkan semangat juang dan menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah. Karya ini ada yang dituangkan dalam medium tembok dan selebaran, ada juga yang mengisi ilustrasi atau karikatur di surat kabar. Mereka menggunakan alat dan media yang sangat sederhana untuk berkarya. Namun, keterbatasan tersebut tidak menghalangi para seniman untuk menyebarkan semangat perjuangan.



Sumber: www.ivaa.com

Lukisan Dullah

Pada masa revolusi fisik, aktivitas pelukis memiliki risiko tinggi. Mereka bisa saja terkena peluru atau ditangkap tentara Belanda. Mereka memiliki rekaman situasi kehidupan pada masa perjuangan fisik yang dituang melalui karya. Beberapa maestro lukis Indonesia, seperti S. Sudjojono, Affandi, Dullah, dan Hendra Gunawan.

Poster digunakan oleh pelukis untuk mengobarkan semangat perjuangan. Selain menggunakan poster, para seniman menggunakan coretan-coretan di gerbong kereta dan bangunan dengan kata "Merdeka ataoe Mati", "Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan", dan kata-kata lainnya yang bernada semangat dan provokatif. Sementara itu, para seniman musik tampil dalam perjuangan dengan mengibarkan semangat rakyat melalui lagu-lagu perjuangan, seperti Cornel Simanjuntak dengan karya lagunya berjudul "Maju Tak Gentar, "Tumpah Darahku", dan "Sorak-sorak Bergembira", Ibu Sud dengan lagunya "Berkibarlah Benderaku", Ismail Marzuki dengan lagunya "Halo-Halo Bandung" dan "Sepasang Mata Bola", serta masih banyak lagi lagu perjuangan lainnya. Di bidang seni peran, para seniman ikut menggelorakan semangat kemerdekaan dengan melakukan pertunjukan keliling. Perpindahan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta menjadi titik penting perkembangan seni peran di masa revolusi. Para seniman berulang kali mengungsi bersama rakyat dan pejuang lainnya. Pengalaman ini mereka tuangkan melalui sandiwara dan seni teater sebagai bahan refleksi sekaligus hiburan bagi rakyat. Beberapa contoh cerita yang dipentaskan, di antaranya "Semarang"; "Awan Berarak" disutradarai oleh Murtono; "Mutiara dari Nusa Laut" karya Usmar Ismail, Sri Murtono, dan Djayakusuma; "Kisah Pendudukan Yogyakarta" disutradarai oleh Dr. Huyung. Sastrawan ikut berjuang dengan menghasilkan karya yang mampu memperkaya pengalaman, menanamkan kesadaran, dan menumbuhkan kepekaan. Salah satu pengarang produktif di masa Revolusi adalah Pramoedya Ananta Toer. Antara tahun 1947–1957, ia telah melahirkan enam novel dan beberapa kumpulan cerpen berlatar masa Revolusi. Beberapa di antaranya *Sepoeloeh Kepala Nica* (1946), *Keluarga Gerilya* (1950), *Dia yang Menyerah* (1951), dan *Bukan Pasar Malam* (1951). Selain Pram, ada juga Idrus yang menulis karya berjudul *Dari Ave Maria Ke Jalan Lain Ke Roma* (1948). Buku ini merupakan kumpulan kisah-kisah dari zaman pendudukan Jepang hingga revolusi fisik di antaranya berjudul *Surabaya, Dari Ave Maria, Jalan Lain ke Roma*.

3. Peran Pelajar dan Mahasiswa

Pada masa-masa Revolusi Nasional, seluruh elemen masyarakat ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Rakyat yang ikut serta dalam perjuangan Revolusi Nasional adalah pelajar dan mahasiswa. Contohnya dalam peristiwa Pertempuran Surabaya November 1945. Arek-arek Suroboyo yang ikut bertempur, banyak di antaranya masih duduk di bangku SMP dan SMA. Para pelajar tersebut berani mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan tanah air. Pelajar dan mahasiswa yang ikut serta berjuang melawan penjajah umumnya berasal dari perkumpulan pelajar yang terbentuk sebelum proklamasi kemerdekaan.

Pada tanggal 25 September 1945, di Yogyakarta diselenggarakan rapat umum yang dihadiri para pemuda dan pelajar dari Jawa dan Madura. Pada September 1945, para pelajar Magelang membentuk Gabungan Sekolah Menengah yang kemudian melebur dengan Ikatan Pelajar Indonesia-Kedu. Pembentukan perkumpulan-perkumpulan pelajar di beberapa wilayah di Indonesia tersebut menunjukkan tumbuhnya rasa patriotisme pelajar Indonesia. Semangat inilah yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya organisasi Ikatan Pelajar Indonesia (IPI).

Selain IPI, rakyat Indonesia membentuk Tentara Pelajar (TRIP). Sesuai namanya, Tentara Pelajar

Profil Pelajar Pancasila

Bernalar kritis

Dapat memahami secara objektif dalam memproses informasi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat menerima pengaruh dari luar tanpa menghilangkan jati diri.

menghimpun para pelajar sekolah menengah yang dilatih sebagai prajurit pertahanan rakyat. Para anggota TRIP ini juga berpartisipasi dalam perjuangan fisik yang terjadi pada Revolusi Nasional. Salah satu tokoh terkenal dalam Tentara Pelajar adalah Mayor Jenderal (Mayjen) Moestopo. Mayjen Moestopo berperan dalam mengukuhkan pasukan pelajar sebagai Tentara Pelajar. Pengukuhan tersebut dilakukan di Lapangan Pingit, Yogyakarta, pada 17 Juli 1946. Ada juga peran mahasiswa kedokteran Ikka Dai Gaku atau yang saat ini dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI). Para mahasiswa kedokteran ini menjadi pelopor dalam revolusi fisik dan melahirkan tokoh-tokoh politik yang berperan besar dalam Revolusi Nasional.

Aktivitas Mandiri

Kerjakan sesuai perintahnya!

Carilah foto dari berbagai sumber tentang usaha bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya, baik melalui diplomasi maupun konfrontasi. Jelaskan foto tersebut dalam bentuk lembar esai. Kumpulkan kepada guru untuk mendapatkan penilaian.

Aktivitas Kelompok

Kerjakan sesuai perintahnya!

Agresi Militer Belanda adalah serangkaian konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda yang terjadi setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Agresi Militer Belanda bertujuan untuk merebut wilayah-wilayah strategis di Indonesia yang kaya sumber daya alam, terutama minyak bumi. Buatlah kelompok yang beranggotakan 4–5 orang. Diskusikan mengenai perbedaan Agresi Militer Belanda I dan II. Carilah informasinya di berbagai sumber sebagai bahan diskusi. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas.

Glosarium

BFO	: Bijeenkomst Federal Overleg adalah perkumpulan negara-negara boneka bentukan Belanda dalam lingkungan NKRI
De jure	: secara hukum
Garis van Mook	: garis khayal yang menghubungkan dua daerah terdepan yang dikuasai Belanda sebagai hasil dari agresi militernya
Proklamasi	: pemberitahuan resmi kepada rakyat

Penilaian Sumatif

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!

1. Berikut ini tugas AFNEI di Indonesia, *kecuali*
 - a. menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang
 - b. membebaskan para tawanan perang
 - c. menegakkan dan mempertahankan keadaan damai
 - d. menuntut penjahat perang
 - e. memperbaiki keadaan ekonomi

Scan untuk
mengerjakan via
online dengan
membuka file
melalui adobe
acrobat atau foxit



Bab 2

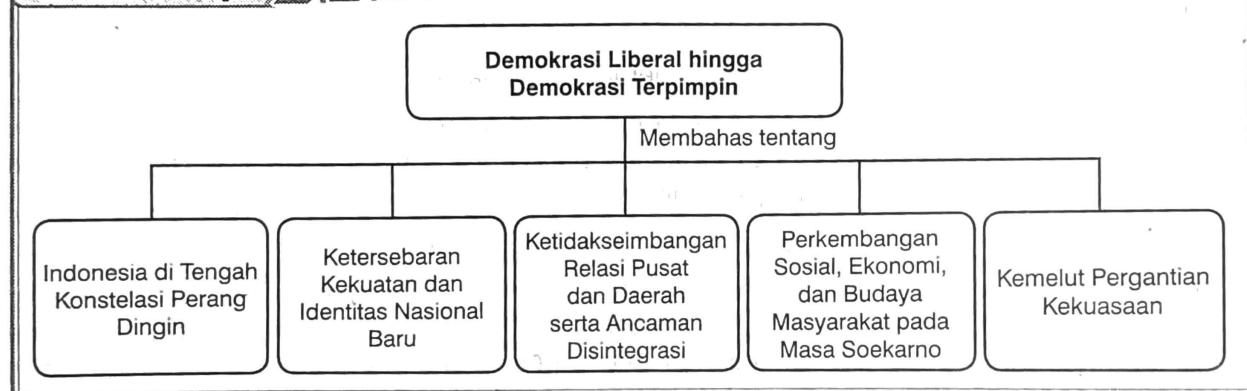
Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu:

- menjelaskan posisi Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin;
- menganalisis berbagai kekuatan dan identitas politik pada periode 1950–1966;
- menganalisis berbagai ancaman disintegrasi karena ketidakseimbangan relasi daerah dan negara;
- menganalisis berbagai perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat;
- melakukan penelitian sederhana tentang efek domino peristiwa 30 September 1965;
- menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto.

Peta Konsep



Apersepsi

Masa demokrasi liberal di Indonesia berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Demokrasi liberal juga disebut sebagai demokrasi parlementer memiliki ciri sebuah negara yang dipimpin oleh perdana menteri bersama presiden yang menjabat sebagai kepala negara. Pada masa demokrasi liberal, parlemen memiliki peran yang sangat penting karena menjadi perpanjangan tangan dari rakyat yang ikut dalam perpolitikan negara. Selain itu, kabinet diperbolehkan melakukan kritik kepada pemerintah apabila tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah. Demokrasi liberal berakhir dengan ditetapkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin merupakan sistem pemerintahan terpusat oleh kepala negara. Demokrasi terpimpin mengakibatkan konflik antarkekuatan politik yang pada akhirnya melahirkan peristiwa G-30-S/PKI. Pemikiran politik Soekarno akhirnya menjadi bumerang dan mengantarkannya kepada jatuhnya kekuasaan yang dipegangnya sejak 1960. Apa yang menyebabkan Soekarno lengser? Untuk memperjelas pemahaman Anda tentang demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin, pelajari materi berikut ini!



Sumber: <https://static.promediateknologi.id>

Soekarno
pencetus demokrasi terpimpin

Materi Pembelajaran

A. Indonesia di Tengah Konstelasi Perang Dingin

1. Konstelasi pada Masa Perang Dingin

Perang Dingin adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan konflik ideologi, politik, ekonomi, dan militer antara blok Barat dan blok Timur, yang berlangsung sejak akhir Perang Dunia II hingga runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Perang Dingin tidak melibatkan pertempuran langsung antara kedua blok, tetapi melalui perang-perang *proxy*, perlombaan senjata nuklir, propaganda, spionase, dan intervensi di negara-negara ketiga. Indonesia merupakan salah satu negara ketiga yang terlibat dalam dinamika Perang Dingin.



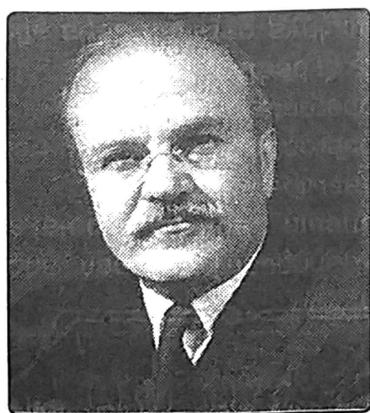
Sumber: <https://karsh.org>

George C. Marshall
Pencetus Marshall Plan

Kedua blok berusaha untuk meluaskan pengaruh ideologinya ke seluruh dunia dengan cara memberikan bantuan berupa ekonomi dan militer kepada pihak-pihak yang terdampak perang. Amerika Serikat memberikan bantuan berupa Marshall Plan untuk membangun kota-kota yang menjadi tempat pertempuran. Usulan ini pertama dicetuskan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat George C. Marshall. Pada tanggal 5 Juni 1947, Marshall menyuarakan bantuan bagi Eropa dalam pidatonya di Universitas Harvard. "Sejurnya Eropa membutuhkan bantuan makanan dari luar negeri selama tiga sampai empat tahun ke depan, khususnya dari Amerika. Kebutuhan ini lebih besar dari kemampuannya".

Marshall mengusulkan agar negara-negara Eropa merancang program perbaikan ekonomi yang nantinya akan

dibantu Amerika Serikat. Pada pertengahan Juni 1947, Inggris dan Prancis mengundang negara-negara Eropa ke Paris untuk membicarakan rencana pemulihan ekonomi bersama. Uni Soviet menolak hadir. Demikian pula Hungaria, Cekoslovakia, dan Polandia yang sudah dibawah pengaruh Negara Tirai Besi. Hasil pertemuan di Paris kemudian dibawa Komite Kerja Sama Ekonomi Eropa (CEEC) ke Kongres AS. Kongres AS meloloskan Undang-Undang Kerja Sama Ekonomi pada tanggal 2 April 1948. Pada tanggal 3 April 1948, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman menandatangani undang-undang tersebut. Amerika Serikat takut jika negara-negara itu tidak diberikan bantuan ekonomi pasca-Perang Dunia II, akan ada banyak pengangguran dan kemiskinan yang dapat menjadi lahan subur bagi perkembangan komunisme.



Sumber: <https://sun6-23.userapi.com>

Vyacheslav Molotov
Pencetus Molotov Plan

Sebagai tandingan dari Marshall Plan, pada saat yang hampir bersamaan Uni Soviet meluncurkan Molotov Plan yang juga memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara di kawasan Eropa Timur. Tokoh yang menolak Marshall Plan adalah Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Vyacheslav Molotov. Molotov Plan menjadi simbol penolakan Uni Soviet terhadap Marshall Plan. Soviet sadar Marshall Plan bertujuan melemahkan pengaruh Uni Soviet. Tujuan dibentuknya Molotov Plan untuk menguatkan pengaruh Uni Soviet di Eropa Timur. Awalnya, rencana ini bernama Brother Plan.

Sistem yang ditawarkan Molotov Plan adalah sistem perdagangan bilateral. Molotov Plan membuat negara-negara

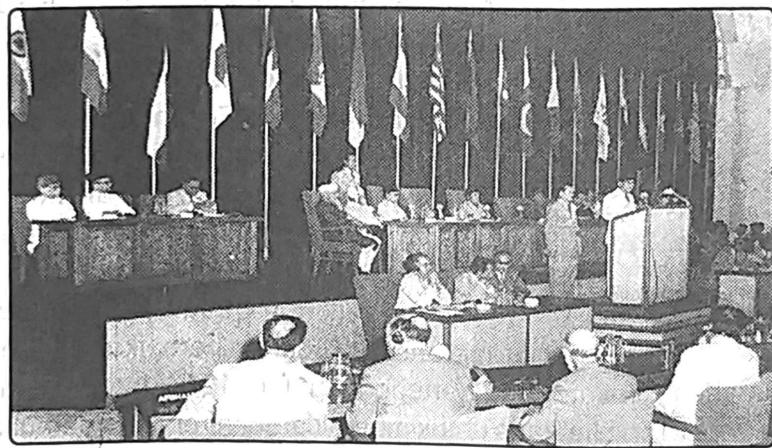
di Eropa Timur berhenti mengandalkan bantuan AS untuk membangun kembali negaranya setelah Perang Dunia II. Molotov Plan menjadi cikal bakal Comecon (Council for Mutual Economic Assistance) yang didirikan pada 1949. Di sisi lain, Molotov Plan terkesan kontradiktif. Sebab, Uni Soviet memberikan bantuan, namun juga menagih biaya perbaikan kepada negara-negara blok Poros atas kerugian Perang Dunia II.

2. Peran Indonesia dalam Perang Dingin

Munculnya organisasi-organisasi dunia memiliki cita-cita menciptakan perdamaian dunia. Indonesia yang mengalami penjajahan dan baru saja merdeka ikut serta dalam pembentukan organisasi perdamaian.

a. Konferensi Asia Afrika

Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika dilatarbelakangi oleh semangat perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya pasca-Perang Dunia II. Pasca-Perang Dunia II, konfigurasi politik dunia ditandai oleh munculnya bipolarisasi kekuatan antara dua kekuatan dunia yang saling berebut pengaruh, yaitu blok Barat dan blok Timur. Kedua kekuatan tersebut saling berlomba membuat persenjataan modern.



Sumber: www.kompas.com

Konferensi Asia Afrika

Perlombaan pembuatan senjata telah menimbulkan ketegangan dan kecemasan dunia. Masyarakat dunia mencemaskan akan terjadinya perang dahsyat di antara dua kekuatan. Melihat situasi dunia, negara-negara berkembang terdorong untuk mencari jalan keluar membantu meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian dunia. Sebagai negara berkembang, Indonesia berinisiatif mengadakan konferensi perdamaian yang dikenal sebagai Konferensi Asia Afrika.

Konferensi Asia Afrika berhasil diselenggarakan dan dibuka oleh Presiden Soekarno pada tanggal 18 April 1955 di Bandung. Konferensi Asia Afrika diikuti sebanyak 24 negara. Konferensi Asia Afrika melahirkan 10 butir pokok yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. Sepuluh butir pokok tersebut termuat dalam Dasasila Bandung. Adapun isi dari Dasasila Bandung sebagai berikut.

- 1) Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
- 2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
- 3) Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil.
- 4) Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain.

- 5) Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB.
- 6) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain.
- 7) Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara.
- 8) Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasie, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
- 9) Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.
- 10) Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Setelah berakhirnya Konferensi Asia Afrika, banyak negara yang belum merdeka atau masih berada di bawah pengawasan kaum imperialis mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan dan kedudukan sebagai negara yang berdaulat penuh. Di samping itu, Konferensi Asia Afrika sangat besar pengaruhnya di dunia internasional dan turut menjadi pendorong berdirinya organisasi Gerakan Non-Blok. Dengan demikian, Konferensi Asia Afrika sangat besar pengaruhnya dalam usaha untuk menciptakan perdamaian dunia yang kekal dan abadi.

Hubungan antara negara-negara di kawasan Asia Afrika terus berlanjut. Hubungan itu diwujudkan dalam konferensi-konferensi yang lebih khusus, antara lain KMAA (Konferensi Mahasiswa Asia Afrika); KWAA (Konferensi Wartawan Asia Afrika); KWAA (Konferensi Wanita Asia Afrika); KSKAA (Konferensi Setia Kawan Asia Afrika); KIAA (Konferensi Islam Asia Afrika); MMAA (Musyawarah Menteri Asia Afrika); FFAA (Festival Film Asia Afrika); KPAA (Konferensi Pengarang Asia Afrika)

b. Gerakan Non-Blok

Organisasi Gerakan Non-Blok muncul di tengah persaingan dua kekuatan besar dunia, yaitu blok Barat dan blok Timur. Persaingan kedua blok terjadi pada masa Perang Dingin. Negara-negara blok Timur dipimpin Uni Soviet, sementara negara-negara blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat. Tiap-tiap blok berusaha menarik dukungan dari negara-negara lain. Agar negara-negara berkembang tidak terkena pengaruh blok Barat maupun blok Timur, maka didirikanlah organisasi Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok sendiri berawal dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika/Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung, pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok mana pun mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi blok Barat dan blok Timur. Pendiri Gerakan Non-Blok, yaitu Josip Broz Tito (Presiden Yugoslavia); Soekarno (Presiden Indonesia); Pandit Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India); Gamal Abdul Nasser (Presiden Mesir); dan Kwame Nkrumah dari Ghana.

Diadakannya Gerakan Non-Blok mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan yang dimaksud sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota. Caranya dengan membantu perjuangan negara-negara berkembang dalam mencapai persamaan, kemerdekaan, dan kemakmuran.
- 2) Turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin.

Pendidikan Antikorupsi

Orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar. Orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah.

- 3) Membendung pengaruh negatif dari blok Barat maupun blok Timur ke negara-negara anggota Gerakan Non-Blok.

Meskipun persaingan antara blok Barat dan blok Timur telah berakhir, organisasi Gerakan Non-Blok tetap berjalan. Hal ini disebabkan GNB lahir dari keinginan dan semangat mencegah perang dan memperkuat perdamaian. Setelah Perang Dingin berakhir, perang dan konflik bersenjata masih muncul di beberapa negara.

Ketegangan Perang Dingin sering dipicu oleh perbedaan ideologi. Saat ini, dunia dilanda masalah kesenjangan ekonomi dan tatanan dunia yang tidak adil. Permasalahan tersebut diselesaikan oleh negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok.

Peran serta Indonesia dalam Gerakan Non-Blok sebagai berikut.

- 1) Sebagai salah satu negara pemrakarsa.
- 2) Sebagai salah satu negara pengundang pada Konferensi Tingkat Tinggi GNB yang pertama.
- 3) Ketua GNB pada tahun 1992–1995. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara KTT X GNB di Jakarta. Peserta yang menghadiri KTT X berjumlah 106 negara.
- 4) Indonesia turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM, dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Indonesia memandang GNB sebagai wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Sikap ini secara konsekuensi diaktualisasikan Indonesia dalam kiprahnya di GNB.



Sumber: www.kompas.com

Pendiri Gerakan Non-Blok

B. Ketersebaran Kekuatan dan Identitas Nasional Baru

Identitas nasional adalah ciri khas suatu bangsa, pandangan hidup, kepribadian, falsafah bangsa, dan ideologi yang dianut suatu bangsa. Identitas nasional akan membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya sehingga mudah untuk dikenali. Pada masa demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin terdapat banyak kelompok yang memiliki massa, baik yang berbasis ideologi politik maupun agama. Kekuatan kelompok tersebut memunculkan warna yang beragam pada identitas nasional dan berbagai peristiwa sejarah di Indonesia.

1. Gerakan Perempuan

Pada masa awal kemerdekaan (1945–1949), kata wanita lebih menjamur digunakan organisasi-organisasi perempuan. Di antaranya adalah Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) dan Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Pada awal 1950-an, banyak organisasi perempuan yang berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan organisasi massa yang besar. Sebagai contoh, Aisyiah dari Muhammadiyah, Muslimat dari Masyumi, Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dari NU, Perwari, dan juga Gerakan Wanita Istri Sedar (Gerwis).

Gerwis merupakan gabungan dari ratusan aktivis dan berbagai organisasi perempuan, misalnya, Rukun Putri Indonesia, Persatuan Wanita Sedar, Isteri Sedar, Gerakan Wanita Indonesia, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia. Pada kongres pertama tahun 1951, Gerwis berubah nama menjadi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia).

Pada tahun 1950-an terdapat isu yang sangat krusial. Isu tersebut mengenai perkawinan dan poligami. Aktivis perempuan menilai perlunya dibentuk komisi khusus yang merancang hukum perkawinan yang berpihak pada perempuan. Untuk itu, dibentuk Komisi NTR (Nikah, Talak, Rujuk). Polemik pembuatan UU Perkawinan masih bergulir sampai dengan berakhirnya pemerintahan Soekarno dan akhirnya dapat disahkan pada tahun 1974.

2. Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Liberal

Masa demokrasi liberal di Indonesia (1950–1959) disebut masa kabinet parlementer. Kabinet parlementer adalah kabinet yang pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang perdana menteri. Pada masa kabinet parlementer sering terjadi konflik antarpertai di Indonesia sehingga kabinet terpaksa jatuh bangun. Hal tersebut memberi dampak terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan. Selama berlakunya UUDS 1950 (1950–1959), pemerintahan Republik Indonesia mengalami pergantian kabinet sebanyak tujuh kali secara berturut-turut sebagai berikut.

a. Kabinet Natsir (6 September 1950–27 April 1951)



Sumber: <https://wikipedia.com>

Mohammad Natsir

Kabinet Natsir merupakan zaken kabinet dan hasil koalisi yang berintikan Masyumi, tetapi tidak mengikutsertakan PNI. Kabinet dilantik pada September 1950 dengan Muhammad Natsir (Masyumi) sebagai Perdana Menteri. Program kerja kabinet meliputi menyempurnakan organisasi angkatan perang; menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman; mengonsolidasi dan menyempurnakan organisasi susunan pemerintahan; mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat; memperjuangkan penyelesaian Irian Barat. Salah satu keberhasilan Kabinet Natsir adalah Indonesia diterima sebagai anggota PBB

yang ke-60 pada 28 September 1950. Adapun penyebab jatuhnya Kabinet Natsir adalah kebuntuan hasil perundingan Indonesia–Belanda dalam masalah pengembalian Irian Barat serta adanya mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 39 Tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah.

b. Kabinet Sukiman (27 April 1951–3 April 1952)



Sumber: <https://imgsrc2.vol.id>

Sukiman Wirjosandjojo

Presiden Soekarno menunjuk dr. Sukiman Wirjosandjojo dari Masyumi dan dr. Suwiryo dari PNI untuk membentuk kabinet. Atas usaha dua orang formatur ini terbentuklah kabinet yang diberi nama Kabinet Sukiman dengan Perdana Menteri dr. Sukiman dan Wakil Perdana Menteri dr. Suwiryo. Koalisi dalam kabinet diharapkan bisa memunculkan kestabilan politik.

Program dari Kabinet Sukiman sebagai berikut.

- 1) Keamanan, yaitu akan menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum.
- 2) Sosial-ekonomi, yaitu mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agrarian agar sesuai dengan kepentingan petani.

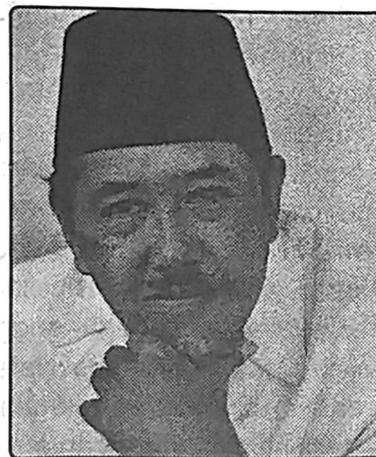
- 3) Mempercepat persiapan-persiapan pemilihan umum.
- 4) Politik luar negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI.

Masalah utama yang menyebabkan runtuhan Kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara Menlu Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Merle Cochran. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintahan Amerika kepada pemerintahan Indonesia berdasarkan ikatan *Mutual Security Act* (MSA). Hal ini ditafsirkan bahwa Sukiman telah condong kepada blok Barat sehingga melanggar garis politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

c. Kabinet Wilopo (3 April 1952–3 Juni 1953)

Kabinet Wilopo disebut *zaken kabinet* karena terdiri atas para pakar di bidangnya. Wilopo dari PNI terpilih sebagai perdana menteri. PSI dan PSII ikut dalam pemerintahan. Program kerjanya meliputi persiapan pemilu; meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; meningkatkan keamanan dalam negeri; perjuangan pembebasan Irian Barat; melaksanakan politik bebas aktif; dan melengkapi UU Perburuhan. Tantangan yang dihadapi Kabinet Wilopo selain gerakan separatis, juga adanya "Peristiwa 17 Oktober 1952" dan "Peristiwa Tanjung Morawa". Peristiwa itu mendapatkan sorotan tajam dari pers dan parlemen. Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia (Sakti) mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 2 Juni 1953.

d. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953–12 Agustus 1955)



Sumber: <https://sahabatmuseumkaa.com/>
Ali Sastroamidjojo

Kabinet Ali Sastroamidjojo I merupakan kabinet keempat yang dibentuk setelah bubarinya negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini bertugas pada periode 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Kabinet Ali Sastroamidjojo I ini juga memiliki sebutan lain, yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro-Zainul Arifin. Adapun program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo sebagai berikut.

- 1) Program dalam negeri yang mencakup soal keamanan, pemilihan umum, kemakmuran, dan keuangan, organisasi negara, perburuhan, dan perundang-undangan.
- 2) Pengembalian Irian Barat.
- 3) Politik luar negeri bebas dan aktif.
- 4) Penyelesaian pertikaian politik.

Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 memiliki pengaruh dan arti penting bagi solidaritas serta perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika. Selain itu, Konferensi Asia Afrika juga membawa akibat yang lain sebagai berikut.

- 1) Berkurangnya ketegangan dunia.
- 2) Australia dan Amerika mulai berusaha menghapus politik diskriminasi ras di negaranya.
- 3) Indonesia mendapat dukungan diplomasi dari Negara Asia Afrika dalam usaha menyatukan Irian Barat di PBB.

Pada tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Penyebabnya keadaan ekonomi yang memburuk, maraknya korupsi dan inflasi, dan sebab terutamanya adalah masalah TNI-AD sebagai kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952.

e. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955–3 Maret 1956)

Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo I dihyatakan demisioner, Hatta selaku pejabat Presiden (Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji) segera mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai untuk menentukan formatur kabinet. Formatur kabinet mempunyai tugas pokok membentuk kabinet dengan dukungan yang cukup dari parlemen yang terdiri atas orang-orang yang jujur dan disegani. Tuntutan ini kemudian berhasil dipenuhi oleh Burhanuddin Harahap selaku formatur yang ditunjuk oleh Hatta. Pada tanggal 11 Agustus 1955, kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap diumumkan.

Program Kabinet Burhanuddin Harahap sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan pemilihan umum.
- 2) Pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia.
- 3) Melaksanakan kerja sama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas aktif.

Prestasi yang menonjol dari kabinet ini meliputi berikut.

- 1) Berhasil melaksanakan pemilu pertama 1955.
- 2) Berhasil menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI-AD dengan diangkatnya kembali Kolonel Nasution sebagai KSAD pada Oktober 1955.

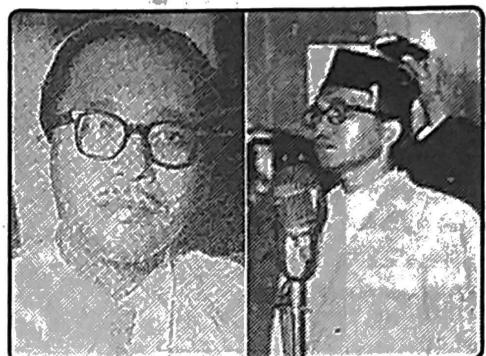
Setelah pemilu, Kabinet Burhanuddin Harahap tidak mendapat dukungan dari parlemen sehingga pada tanggal 3 Maret 1956, Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

f. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956–4 Maret 1957)

Kabinet Ali Sastroamidjojo II merupakan hasil koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Kabinet dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo. Program kerjanya disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program-program jangka panjang meliputi perjuangan pengembalian Irian Barat; pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat pelantikan anggota-anggota DPRD; mengusahakan perbaikan nasib buruh dan pegawai; menyehatkan perimbangan keuangan negara; mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Masalah yang dihadapi kabinet adalah pergolakan di daerah yang semakin menguat (pembentukan dewan militer di Sumatra dan Sulawesi) dan timbul perpecahan antara Masyumi dan PNI dalam kabinet. Masyumi menghendaki agar Ali menyerahkan mandatnya sesuai dengan tuntutan daerah, tetapi PNI menolak karena mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer. Posisi Kabinet Ali melemah setelah pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet.

g. Kabinet Djuanda (9 April 1957–10 Juli 1959)

Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya bertugas pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Dipimpin oleh Ir. H. Djuanda Kartawidjadjaja dan tiga wakilnya, Mr. Hardi, Idham Chalid, dan dr. Leimana, kabinet ini dikenal sebagai zaken kabinet. Zaken kabinet adalah kabinet yang jajarannya tidak diisi oleh partai politik tertentu, melainkan diisi oleh para



Sumber: www.goodnewsfromindonesia.id
Burhanuddin Harahap

Profil Pelajar Pancasila

Berkebinekaan Global

Dapat menanamkan rasa saling menghargai dan menghormati dalam merespons terbentuknya budaya baru yang memiliki poin positif serta tidak berlawanan dengan jati diri bangsa Indonesia.



Sumber: <https://static.republika.co.id>
Djuanda Kartawidjaja

tokoh yang ahli dalam bidangnya. Program kerja Kabinet Djuanda dikenal dengan nama "Panca Karya".

Adapun program Kabinet Djuanda sebagai berikut.

- 1) Membentuk Dewan Nasional.
- 2) Normalisasi keadaan Republik Indonesia.
- 3) Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB.
- 4) Perjuangan pengembalian Irian Barat.
- 5) Mempergiat/mempercepat proses pembangunan.

Pemerintahan Kabinet Djuanda mendeklarasikan hukum teritorial kelautan Nusantara. Dikeluarkannya deklarasi ini membawa manfaat bagi Indonesia, yaitu mampu menyatukan wilayah-wilayah Indonesia dan sumber daya alam dari laut bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda.

Pada masa kabinet ini, terjadi peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang disebut Peristiwa Cikini. Peristiwa Cikini terjadi di depan Perguruan Cikini pada tanggal 30 November 1957. Kabinet Djuanda berakhir dengan dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

3. Pemilihan Umum 1955

Pemilu pertama tahun 1955 memiliki arti penting dan berkaitan dengan upaya menata kehidupan bernegara RI yang waktu itu usianya masih relatif sangat muda. Melalui pemilu tersebut, untuk pertama kalinya rakyat diberi kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di kursi DPR. Melalui pemilu pertama dibentuk Dewan Konstituante yang bertugas merumuskan UUD.

Pelaksanaan pemilihan umum sebenarnya telah diprogramkan oleh beberapa kabinet yang memerintah di masa parlementer. Pemilu memang menjadi agenda penting bangsa Indonesia waktu itu, karena dengan pemilu diharapkan akan segera terbentuk pemerintahan yang demokratis dan dapat menjalankan program-program perbaikan ekonomi rakyat.

Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I (4 November 1953) sebenarnya telah terbentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang dipimpin oleh S. Hadikusumo. Waktu pemilihan umum sudah ditetapkan, yakni tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante. Namun, sebelum pemilihan umum dilaksanakan, Kabinet Ali Sastroamidjojo I terlebih dahulu jatuh, dan mengembalikan mandat kepada Wakil Presiden Moh. Hatta pada tanggal 24 Juli 1955 karena Presiden Soekarno sedang beribadah haji.

Wakil Presiden Moh. Hatta segera menunjuk tiga formatur untuk membentuk kabinet baru, yaitu Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI), dan Asaat (nonpartai). Namun, usaha pembentukan kabinet melalui tiga formatur ini tidak berhasil sehingga ditunjuklah Burhanuddin Harahap (Masyumi) sebagai formatur baru. Semula, Burhanuddin Harahap akan mengikutsertakan PNI untuk membentuk kabinet, tetapi usaha ini tidak berhasil. Akhirnya, Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk tanpa wakil dari PNI. Kabinet inilah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan umum pada waktu yang sudah ditetapkan oleh kabinet sebelumnya.

Kabinet Burhanuddin Harahap ternyata sukses menjalankan program pemilu pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Sesuai rencana, pemilu pertama 1955 diselenggarakan dalam dua tahap dengan masing-masing tujuan sebagai berikut.

- a. Tahap pertama diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dengan tujuan untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

- b. Tahap kedua diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 dengan tujuan untuk memilih anggota-anggota Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar).

Pemilu pertama diikuti oleh puluhan partai, organisasi massa, dan perorangan. Dalam pelaksanaannya, seluruh Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa.

Dalam proses pemilihan umum 1955 terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Selain itu, masih ada 86 organisasi dan perseorangan akan ikut dalam pemilihan umum. Dalam pendaftaran pemilihan tidak kurang dari 60% penduduk Indonesia yang mendaftarkan namanya (kurang lebih 78 juta), angka yang cukup tinggi yang ikut dalam pesta demokrasi yang pertama.

Pemilu yang berhasil dilaksanakan pada tahun 1955 tersebut memunculkan empat partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante.

Berikut posisi empat besar dalam pemilu ini.

- Partai Nasional Indonesia.
- Masyumi.
- Nahdlatul Ulama.
- Partai Komunis Indonesia.

Dominasi empat partai tersebut dapat dilihat dari perimbangan kursi di DPR dan di konstitusi.

- Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen).
- Masyumi 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen).
- Nahdlatul Ulama 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen).
- Partai Komunis Indonesia 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen).



Sumber: <https://sma13smg.sch.id/>

Pemilu 1955

Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1960. Hal ini dikarenakan pada tanggal 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945. Presiden Soekarno juga membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat oleh Presiden.

4. Nasionalisme, Agama, dan Komunis (Nasakom)

Nasakom merupakan kepanjangan dari nasionalisme, agama, dan komunis. Paham Nasakom mewarnai sejarah pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin (1959–1965). Nasakom dicetuskan oleh sang proklamator, Ir. Soekarno. Meskipun baru dikenal luas

menjelang berakhirnya dekade 1950-an, namun konsep ini sudah terpikirkan jauh sebelum Bung Karno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) sejak 17 Agustus 1945. Gagasan tiga pilar utama sudah terbersit dalam pikiran Soekarno sejak 1926, ketika Bung Karno mendeklarasikan berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI). Soekarno menulis sebuah artikel tentang persatuan tiga konsep gerakan untuk mengusir penjajah, yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme (dalam *Suluh Indonesia Muda*, 1926).

Pada masa pergerakan nasional, terdapat tiga aliran politik yang bisa dijadikan sebagai pilar utama kekuatan rakyat beserta wadah atau organisasi yang bisa menaungi masing-masing pilar. Pilar pertama adalah golongan nasionalis yang diwakili Indische Partij (IP). IP sendiri adalah organisasi pergerakan yang dibentuk pada 1912 oleh Tiga Serangkai, yakni Tjipto Mangoenkoesoemo, Douwes Dekker, dan Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hajar Dewantoro.

Pilar kedua adalah kelompok agamis yang diwakili oleh umat Islam sebagai golongan agama terbesar. Menurut Soekarno, Sarekat Islam (SI) yang dipimpin oleh H.O.S. Tjokroaminoto layak menjadi representasi kalangan agama ini. Pilar ketiga adalah Marxisme yang saat itu sepatutnya diemban oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Kala itu, komunisme belum menjadi ideologi terlarang. Begitu pula dengan PKI yang terbentuk belum terlalu lama.

Konsep Nasakom diterapkan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Namun, langkah tersebut tidak serta-merta dapat diterima oleh rakyat dan tokoh-tokoh politik. Hatta, sebagai wakil presiden menentang konsep demokrasi terpimpin dan Nasakom sehingga dua sosok proklamator itu akhirnya berpisah jalan. Dengan pecahnya dwitunggal, manuver politik Nasakom semakin digencarkan oleh Soekarno. Kampanye Nasakom dibawa oleh Presiden Soekarno ke forum internasional. Dalam sidang PBB, 30 September 1960, di New York, Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul "To Build The World a New". Soekarno membentuk Nasakom untuk menggantikan sistem demokrasi parlementer yang dianggap tidak bisa menyejahterakan rakyat. Bagi Soekarno, demokrasi parlementer melindungi sistem kapitalisme yang lebih mengedepankan kaum borjuis. Ideologi Nasakom pada saat PKI melakukan pemberontakan 30 September 1965 dengan menculik tujuh dewan jenderal.

C. Ketidakseimbangan Relasi Pusat dan Daerah serta Ancaman Disintegrasi

Dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia tidak hanya melakukan perlawanan dari bangsa asing, tetapi juga dari perlawanan bangsa sendiri. Hal ini lantaran adanya konflik dan pergolakan di dalam negeri, salah satunya berkaitan dengan sistem ideologi serta ketimpangan antara pusat dan daerah. Berikut sejumlah disintegrasi yang mengancam NKRI sepanjang tahun 1950–1960-an.

1. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia

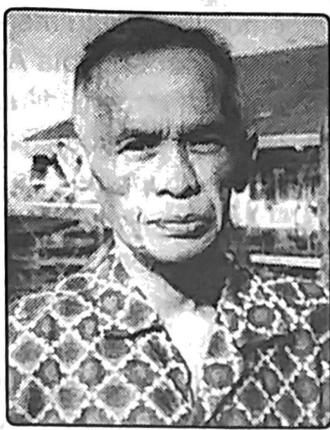
Gerakan Darul Islam (DI) merupakan gerakan politik yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut Tentara Islam Indonesia (TII) sehingga biasa disebut dengan DI/TII. Pemberontakan DI/TII muncul di Jawa Barat setelah bangsa Indonesia berhasil mengatasi pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan DI/TII merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia, sebab pemberontakan ini menyebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Jawa, Sumatra, Sulawesi maupun Kalimantan.

a. DI/TII Jawa Barat

Pimpinan DI/TII di Jawa Barat adalah Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo. Pemberontakan DI/TII dipicu oleh ketidaksenangan Kartosoewiryo atas disetujuinya hasil Perundingan Renville. Berdasarkan hasil Perundingan Renville, pasukan TNI harus ditarik ke daerah republik. Hal itu menyebabkan pasukan Divisi Siliwangi dan laskar yang ada di Jawa Barat untuk mengundurkan diri dari wilayah Jawa Barat menuju Yogyakarta.

Ketidaksetujuan Kartosoewiryo ditunjukkan dengan ketidaksediaan Kartosoewiryo dan pasukannya, Hizbulah dan Sabilillah untuk mundur sehingga memutuskan tetap tinggal di Jawa Barat.

Pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat, Kartosoewiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) memanfaatkan kekosongan kekuatan TNI di wilayah itu. Kartosoewiryo juga membentuk pasukan yang mendukung berdirinya NII yang disebut Tentara Islam Indonesia (TII). Dengan demikian, kelompok ini dinamakan DI/TII. Hal yang menarik adalah Kartosoewiryo dianggap sebagai pimpinan tertinggi (imam) dari gerakan DI/TII di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi.



Sumber: <https://biografiku.com/>

Kartosoewiryo

Pada tanggal 25 Januari 1949, pasukan Divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat dari Yogyakarta dalam rangka *long march*. Kedatangan pasukan Divisi Siliwangi ini dianggap sebagai suatu ancaman bagi tercapainya cita-cita Kartasoeuwiryo. Akibatnya, terjadi pertempuran antara pasukan DI/TII Kartosoewiryo dan Divisi Siliwangi. Dengan demikian, pasukan TNI (Divisi Siliwangi) pada saat itu di Jawa Barat menghadapi dua musuh sekaligus, yaitu Belanda dan pasukan DI/TII Kartosoewiryo. Untuk mengatasi pemberontakan DI/TII Kartosoewiryo, pemerintah RI sebenarnya telah melakukan cara-cara damai untuk menyelesaiakannya. Untuk itu, pemerintah membentuk komite di bawah pimpinan Natsir pada bulan September 1949. Akan

tetapi, komite tidak berhasil mengajak Kartosoewiryo untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Penumpasan Gerakan DI/TII di Jawa Barat memakan waktu yang lama. Pada tahun 1960-an, Divisi Siliwangi mulai melancarkan operasi secara sistematis dan besar-besaran. Berkat keuletan dan kegigihan satuan-satuan TNI Siliwangi yang bersatu dengan rakyat dalam melakukan Operasi Pagar Betis, pasukan DI/TII dapat dipadamkan dan dilumpuhkan. Pada tanggal 4 Juni 1962, tokoh utama gerakan DI/TII, yaitu Kartosoewiryo berhasil ditangkap oleh Divisi Siliwangi di Gunung Geber daerah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kartosoewiryo akhirnya dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Agustus 1962. Tindakan Kartosoewiryo sangat membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Rakyat sangat dirugikan karena Kartosoewiryo bersama anggotanya melakukan teror, pembunuhan, perusakan, dan pengambilan harta kekayaan penduduk secara paksa.

b. DI/TII Jawa Tengah

Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah yang sebelumnya adalah Komandan Hizbulah di Front Tulangan, Sidoarjo, dan Mojokerto di Jawa Timur. Amir Fatah memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di Desa Pangarasan, Tegal pada tanggal 23 Agustus 1949. Pasukan yang mendukung Amir Fatah juga diberi nama Tentara Islam Indonesia (TII).

Pada bulan Desember 1951, kekuatan militer Amir Fatah bertambah kuat setelah bergabungnya Batalion 426 yang membelot. Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah melakukan "Operasi Merdeka Timur" yang dipimpin oleh Letkol Soeharto, Komandan Brigade Pragolo. Pada awal tahun 1952, kekuatan Batalion 426 dapat dihancurkan. Sisa-sisanya melarikan diri memasuki wilayah operasi Gerakan Benteng Negara, kemudian bergabung dengan sisa-sisa DI/TII Amir Fatah dan sisa anggota Batalion Lemah Lanang yang sebelumnya menjadi anggota Angkatan Umat Islam (AUI) pimpinan Kiai Somolangu (Kiai Mahfudz Abdurrahman) yang dianggap memberontak.

Menghadapi persoalan tersebut, TNI kembali menggelar operasi militer dengan nama Operasi Guntur. Untuk meningkatkan operasi penghancuran kekuatan militer Amir Fatah, pemerintah membentuk pasukan Banteng Raiders. Operasi ini berhasil menghancurkan DI/TII di perbatasan Pekalongan–Banyumas pada bulan Juni 1954.

c. DI/TII Kalimantan Selatan

Ibnu Hajar adalah seorang mantan anggota ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan ber pangkat letnan dua yang menggerakkan pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan. Ia merupakan salah satu anggota ALRI Divisi IV yang merasa kecewa terhadap pemerintah pusat karena penataan ketentaraan yang dilakukan di Kalimantan Selatan. Kebijakan tersebut membuat sebagai anggota harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Di kalangan anggota ALRI Divisi IV yang kecewa terhadap pemerintah, dengan mudah Ibnu Hajar menjadikan mereka sebagai pengikut. Ia menggalang kekuatan rakyat dalam gerakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRyT). KRyT melakukan pemberontakan dengan menyerang pos TNI sejak pertengahan Oktober 1950.

Berbagai penyelesaian damai yang dilakukan pemerintah terus mengalami kegagalan. Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DI/TII Kartosoewiryo. Ia diangkat menjadi Panglima TII Kalimantan.

Pada akhirnya, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan melancarkan operasi militer besar-besaran di seluruh Kalimantan Selatan. Ibnu Hajar berhasil ditangkap dalam sebuah operasi pada bulan Juli 1963 yang selanjutnya diadili dalam Mahkamah Militer. Dalam pengadilan tersebut, ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati.

d. DI/TII Sulawesi Selatan



Sumber: <https://www.detik.com>

Kahar Muzakkar

Kahar Muzakkar sangat aktif berjuang dalam kemerdekaan dan berjasa sebagai komandan TRI Persiapan Resimen Hasanuddin. Setelah perang selesai, dia ditugaskan untuk memimpin laskar-laskar rakyat di Sulawesi Selatan dan membentuk KGSS (Komando Gerilya Sulawesi Selatan). KGSS dibentuk sewaktu perang kemerdekaan dan berkekuatan 16 batalion atau satu divisi. Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Kahar Muzakkar sebagai pemimpinnya menolak dan justru menuntut agar semua anggota KGSS diterima sebagai anggota APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin.

Tuntutan ditolak pemerintah karena keanggotaan APRIS harus melalui seleksi. Penolakan itu mengecewakan karena yang lolos seleksi justru Kapten Andi Azis dan anak buahnya yang mantan tentara KNIL. Untuk meredam kekecewaan, pemerintah memberi solusi untuk anggota KGSS yang tidak diterima menjadi anggota APRIS akan disalurkan ke Corps Tjadangan Nasional (CTN). Namun, hal ini juga tidak banyak membantu. Puncak kekecewaan Kahar Muzakkar terjadi ketika Letkol Warouw diangkat sebagai Komandan Corps Tjadangan Nasional (CTN) bukannya dirinya. Akibatnya, Kahar masuk ke hutan dengan membawa perbekalan dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Kahar Muzakkar kemudian mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI/TII Kartosoewiryo pada tanggal 7 Agustus 1953.

Operasi penumpasan gerakan DI/TII Kahar Muzakkar memakan waktu yang cukup lama. Berkat upaya gigih dari satuan-satuan TNI, akhirnya pada bulan Februari 1956, Kahar

Muzakar berhasil ditembak mati oleh pasukan TNI dalam sebuah operasi. Di samping itu, kaki tangan dari Kahar Muzakar, yaitu Gerungan berhasil ditangkap dalam keadaan hidup pada bulan Juli 1965. Dengan tertangkapnya tokoh gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan, berakhirlah pemberontakan di Sulawesi Selatan.

e. DI/TII Aceh

Pada tanggal 20 September 1953 telah terjadi Pemberontakan DI/TII di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureueh. Daud Beureueh merupakan seorang pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh pada masa perang Agresi Militer Belanda I. Pemberontakan DI/TII di Aceh diawali dengan adanya pernyataan proklamasi terkait berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di bawah imam besar Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo.

Perlawaan yang digerakkan oleh Daud ini menuntut diberikannya hak otonom untuk Aceh. Melihat hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah segera mengambil tindakan untuk menghentikan Pemberontakan DI/TII di Aceh. Pemerintah pusat memiliki dua jalur dalam upaya penyelesaian pemberontakan tersebut, yaitu dengan upaya militer dan diplomasi. Operasi militer dilakukan dengan menyelenggarakan Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka. Sedangkan cara diplomasi diterapkan dengan mengirim utusan ke Aceh untuk berdialog dengan Daud Beureueh. Setelah melewati proses yang cukup panjang, permasalahan ini akhirnya berakhir dengan jalan damai. Pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan hak otonomi kepada Aceh sebagai provinsi yang disebut Daerah Istimewa Aceh dan diizinkan menerapkan syariat Islam. Pada tanggal 18–22 Desember 1962, digelar upacara besar bertajuk Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA) di Aceh sebagai tanda perdamaian.

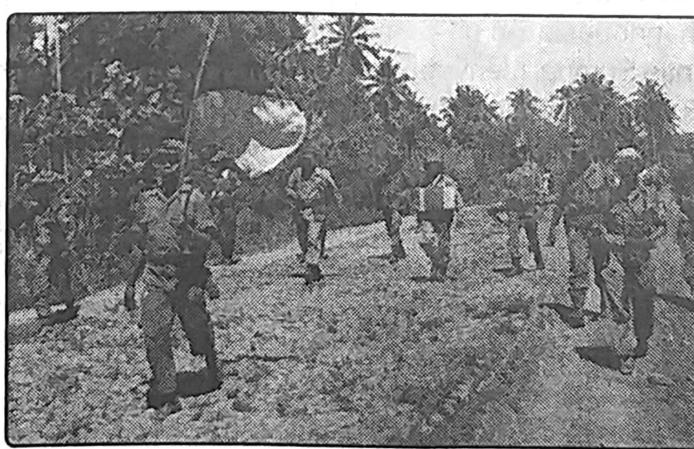
2. PRRI/Permesta

Pemberontakan PRRI dan Permesta terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat. Pemberontakan PRRI dan Permesta terjadi pada tahun 1950-an hingga 1960-an di kawasan Sumatra dan Sulawesi.

a. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Indonesia (PRRI)

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) adalah gerakan pertentangan antara pemerintah RI dan daerah. Gerakan ini muncul pada tahun 1950 di Sumatra. PRRI muncul karena ketidakpuasan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat saat itu. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut.

- 1) Dewan Gajah (Medan) dipimpin oleh Kolonel M. Simbolon.
- 2) Dewan Garuda (Palembang) dipimpin oleh Kolonel Barlian.



Sumber: www.kompaspedia.com

Operasi penumpasan PRRI

Letnan Kolonel Ahmad Husein bersama dengan beberapa tokoh sipil yang lain, seperti Sjarif Usman, Burhanudin Harahap, dan Sjafrudin Prawiranegara bahkan mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat, bahwa dalam waktu 5×24 , jam PM Djuanda

menyerahkan mandatnya kepada Presiden dan diminta untuk kembali kepada kedudukan semula sebagai Presiden yang konstitusional.

Pemerintah pusat menolak tuntutan tersebut dan sejalan dengan itu, diambil keputusan untuk memutuskan hubungan darat dan laut dengan Sumatra. Selanjutnya, daerah Komando Tentara dan Territorium II (TT-II) dinyatakan dalam keadaan bahaya perang. Melihat keputusan pemerintah, Dewan Perjuangan beraksi dengan mendirikan pemerintahan tandingan, yaitu Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan melantik kabinet di Gubernuran Padang pada tanggal 15 Januari 1958. PRRI mengangkat Sjafruddin Prawiranegara sebagai Presiden PRRI.

Semenjak adanya gerakan Pemerintahan Revolusi Republik Indonesia, pemerintah pusat menganggap gerakan tersebut harus segera dituntaskan dengan gencatan senjata. Pemerintah pun melakukan operasi gabungan yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Angkatan Perang RI (APRI) untuk menumpas gerakan PRRI. Berikut operasi yang pernah dilancarkan untuk menumpas PRRI.

- 1) Operasi Tegas dengan sasaran Riau dimulai pada tanggal 12 Maret 1958 dipimpin oleh Let. Kol. Kaharuddin Nasution.
- 2) Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Inf. Ahmad Yani dimulai pada tanggal 17 Agustus 1958.
- 3) Operasi Saptamarga dengan mengamankan Sumatra Utara di bawah pimpinan Brigjen Jatikusumo.
- 4) Operasi Sadar di Sumatra Selatan dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo.

Pada tanggal 29 Maret 1961, Ahmad Husein beserta pasukannya menyerahkan diri dan pemberontakan PRRI berakhir.

b. Perjuangan Rakyat Semesta

Ketidakpuasan atas pelaksanaan pembagian keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan juga terjadi di Sulawesi. Untuk menyikapi kondisi tersebut, akhir Februari 1957 Panglima TT-VII Letkol Ventje Sumual mengadakan pertemuan dengan para staf komandonya. Pertemuan melahirkan sebuah konsepsi yang intinya bahwa penyelesaian keamanan harus segera dilaksanakan agar pembangunan semesta dapat segera dimulai.

Kegiatan selanjutnya adalah mengadakan pertemuan di kantor Gubernur Makassar yang dihadiri oleh tokoh militer dan sipil pada 2 Maret 1957. Pertemuan tersebut melahirkan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) yang ditandatangani oleh 51 tokoh sipil dan militer Indonesia Timur. Piagam tersebut digunakan sebagai dasar pembangunan di wilayah Indonesia Timur. Sementara itu, untuk melancarkan program kerja Permesta, Letkol Ventje Sumual menyatakan bahwa daerah Indonesia Timur dalam keadaan bahaya atau SOB (Staat van Oorlog en Bleg). Wilayah militernya dibagi menjadi empat daerah komando militer (kodam).

Piagam Permesta mendapat dukungan rakyat Sulawesi. Sejak itu, modal pembangunan di daerah diusahakan dengan berbagai cara. Prasarana sosial dan perekonomian mulai dibangun mengejar ketertinggalannya dari sentra-sentra perekonomian di Jawa. Dilakukan pula perdagangan luar negeri demi mencapai jumlah persentase devisa yang dianggap lebih adil pembagiannya dengan pusat. Sebuah universitas (Universitas Permesta) diprakarsai pembangunannya di Manado.

Sekilas Info

Pemberontakan Permesta mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini terbukti saat ditembak jatuhnya sebuah pesawat pada tanggal 18 Mei 1958 di Ambon yang diterbangkan oleh pilot berkebangsaan Amerika Serikat, yaitu Allen Pope.

Sementara itu di Jakarta, setelah Kabinet Ali II menyerahkan mandat pada tanggal 14 Maret 1957, Presiden menyatakan bahwa seluruh wilayah RI dalam keadaan darurat perang. Salah satu penyebabnya adalah munculnya SOB dari Panglima TT-VII/Wirabuana. Pihak Mabes TNI AD awalnya masih memahami kemunculan Piagam Permesta. Namun, ketika Permesta mulai membersihkan PKI di Minahasa, muncul reaksi keras di tingkat nasional. Kemelut politik mulai terjadi di pemerintahan pusat. Puncaknya, Letkol Ventje dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Panglima TT-VII/Wirabuana dan dihapuskannya jajaran TT-VII/Wirabuana dari strategi komando TNI AD.

Letkol Ventje bereaksi dengan membentuk Dewan Tertinggi Permesta. Puncaknya Letkol D.J. Somba, pimpinan Kodam Sulawesi Utara dan Tengah menyatakan putus hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung sepenuhnya PRRI dalam sebuah rapat akbar di Lapangan Sario, Manado pada tanggal 17 Februari 1958.

Pemerintah pusat membentuk Komando Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat untuk mengatasi Permesta. Selanjutnya digelar Operasi Saptamarga I yang dipimpin Letkol Sumarsono untuk wilayah Sulawesi Utara bagian tengah; Operasi Saptamarga II dipimpin Letkol Agus Prasmono dengan sasaran Sulawesi Utara bagian selatan; Operasi Saptamarga III dipimpin Letkol Magenda dengan sasaran pulau-pulau di utara Manado; Operasi Saptamarga IV dipimpin langsung Letkol Rukminto Hendraningrat untuk wilayah Sulawesi Utara.

D. Perkembangan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat pada Masa Soekarno

Perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi pada masa Soekarno merupakan suatu hal yang menarik untuk diulik kembali. Sebab, pada masa tersebut terdapat berbagai peristiwa yang menjadi bagian sejarah Indonesia. Berikut ini uraian beberapa perubahan signifikan pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya tahun 1950–1960-an.

1. Asian Games ke-4 dan Penyelenggaraan Ganefo

Pesta Olahraga Asia yang ke-4 dan diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dari tanggal 24 Agustus 1962 sampai 4 September 1962. Sebanyak 1.460 atlet dari 17 negara berpartisipasi untuk memperebutkan medali pada 15 cabang olahraga yang dipertandingkan, termasuk badminton yang dipertandingkan untuk pertama kalinya di ajang ini. Pada tanggal 8 Februari 1960, Presiden Soekarno menjalin kerja sama dengan Uni Soviet untuk membangun stadion utama Senayan.



Sumber: www.kompaspedia.com

Upacara pembukaan Ganefo

Pada saat penyelenggaraan Asian Games, pemerintah Indonesia menolak untuk menge luarkan visa bagi delegasi Israel dan Taiwan. Tindakan tersebut menyalahi aturan Dewan

Olimpiade Asia. Sebelumnya, Indonesia telah berjanji untuk mengundang semua anggota Federasi, termasuk mereka yang tidak memiliki hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut. Hal tersebut menyebabkan renggangnya hubungan Indonesia dengan International Olympic Committee (IOC) hingga Indonesia memilih mundur dari keanggotaan IOC.

Selepas itu, Soekarno kemudian mengadakan ajang kompetisi sepak bola internasional bertajuk Soekarno Cup pada 1963 di minggu yang sama dengan Olimpiade. Penyelenggaraan Soekarno Cup yang berjalan sukses membuat hubungan para pejabat Asia-Afrika semakin baik. Kondisi ini membuat R. Maladi dan Soekarno optimis menyelenggarakan Ganefo. Ganefo merupakan salah satu wujud kebijakan luar negeri yang mampu membangkitkan reaksi nasionalis rakyat Indonesia untuk mengubah peranan Indonesia dalam dunia internasional sebagai pemimpin negara baru berkembang. Ganefo berawal dari peristiwa Indonesia menerima skorsing dari IOC (Komite Olimpiade Internasional) karena melarang partisipasi Taiwan dan Israel ke Asian Games IV di Jakarta.

Skorsing IOC mengakibatkan Indonesia tidak dapat berpartisipasi dalam Olimpiade. Indonesia berusaha mencari solusi agar prinsip yang dipegang teguh Indonesia dapat diperjuangkan, salah satunya dengan menyelenggarakan Ganefo. Momentum skorsing IOC dimanfaatkan Presiden Soekarno untuk menyatukan rakyat Indonesia dalam melawan salah satu bentuk imperialism di bidang olahraga dan mewujudkan konsepsi politik luar negerinya. Hal itu tecermin dalam pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1963.

Dalam pidatonya, Soekarno mengatakan Indonesia tergabung dalam New Emerging Forces, kekuatan raksasa yang terdiri atas bangsa-bangsa yang tertindas, yang progresif, hendak membangun satu dunia baru yang penuh dengan keadilan, persahabatan, tanpa imperialism, dan kolonialisme. Ganefo sebagai gagasan Presiden Soekarno secara resmi dibuka pada tanggal 10 November 1963 di Jakarta. Adapun pelaksanaannya hingga tanggal 22 November 1963.

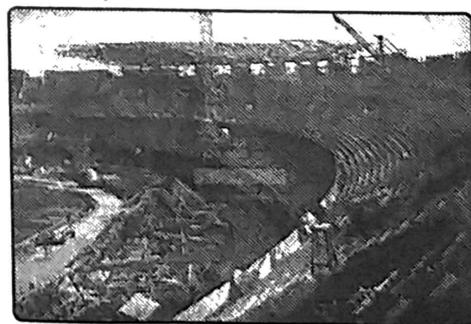
Total 51 negara dan 2.700 atlet mengikuti pembukaan Ganefo I Jakarta dan mengikrarkan janji atlet. Ganefo menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu melaksanakan even olahraga berskala internasional di tengah tekanan yang besar. Atlet Indonesia saat itu juga memberikan prestasi yang membanggakan dengan menempati posisi kedua di bawah RRT.

2. Pembangunan Proyek Mercusuar

Proyek Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Proyek ini dibangun dengan tujuan agar dapat memfasilitasi Ganefo (Games of the New Emerging Forces) sebagai tandingan Olimpiade serta untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Dalam Proyek Mercusuar, Soekarno melancarkan enam proyek yang ia bangun. Namun, proyek ini membuat perekonomian semakin buruk karena adanya pembengkakan biaya. Berikut Proyek Mercusuar yang terealisasikan pada masa kepresidenan Ir. Soekarno.

a. Stadion Gelora Bung Karno (GBK)

Pada tahun 1956, Soekarno sempat berkunjung ke Moskow. Sewaktu di sana, Soekarno sempat melihat kemegahan Stadion Lenin. Bermula dari situ, Soekarno memiliki ide untuk membangun Stadion Senayan atau GBK dengan konsep kemegahan, kekokohan struktur, serta artistik dari Stadion Lenin. Rancangan Stadion GBK dikerjakan oleh L.S. Tyatenko, arsitek yang mengerjakan desain Stadion Lenin. Secara keseluruhan, pembangunan kompleks olahraga Senayan menelan biaya 12,5 juta dolar AS. Sumber pendanaannya dibantu dengan kredit yang diberikan Uni Soviet.



Sumber: <https://arsitekturindonesia.com/>
Pembangunan Gelora Bung Karno

Kemegahan Gelora Bung Karno bermula dari Asian Games III Tahun 1958 di Tokyo, di mana oleh Asian Games Federation, Indonesia ditunjuk untuk menjadi penyelenggara Asian Games IV Tahun 1962. Kepercayaan dunia menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah disambut Presiden RI Pertama Ir. Soekarno dengan membangun sebuah mega proyek berbentuk komplek olahraga yang dilengkapi dengan beragam fasilitas, seperti wisma atlet dan diberi nama Gelora Bung Karno. Kesuksesan penyelenggaraan Asian Games IV mampu mengangkat nama Indonesia di mata internasional.

b. Hotel Indonesia

Hotel Indonesia juga dibangun untuk menyambut Asian Games 1962. Hotel Indonesia menjadi hotel berbintang pertama yang dibangun di Jakarta, dengan 14 lantai menjulang ke atas. Kala itu, Presiden RI Soekarno menggagas pembangunan sarana dan prasarana penunjang untuk Asian Games. Pembangunan Hotel Indonesia menjadi kontroversi.

Kala Indonesia belum lama merdeka dan keuangan negara masih morat-marit, pembangunan stadion, tugu, dan hotel dianggap sebagai pemborosan. Sampai mencuatlah sebutan 'Proyek Mercusuar', bangunan-bangunan megah yang digagas oleh Soekarno sengaja untuk mencuri perhatian dunia. Salah satunya yang masih ada dan terus beroperasional sampai sekarang adalah Hotel Indonesia.



Sumber: <https://liputan6.com/>

Hotel Indonesia

Hotel Indonesia dibangun di pusat Jakarta menempati lahan seluas 25.082 meter persegi, dirancang oleh arsitek asal Amerika Serikat Abel Sorensen dan istrinya, Wendy. Hotel ini dibangun dengan konsep modern minimalis menggabungkan nuansa Sumatra Barat. Untuk zaman 1960-an, hotel dengan gedung berdenah bentuk T ini jelas bangunan yang luar biasa megah. Tercatat sebagai hotel bintang lima pertama di Indonesia. Apalagi fasilitas, seperti elevator saat itu pertama kali hadir di Hotel Indonesia, belum lagi klub dansa dan kolam renang terbuka. Proyek pembangunan Hotel Indonesia resmi dibuka tanggal 5 Agustus 1962.

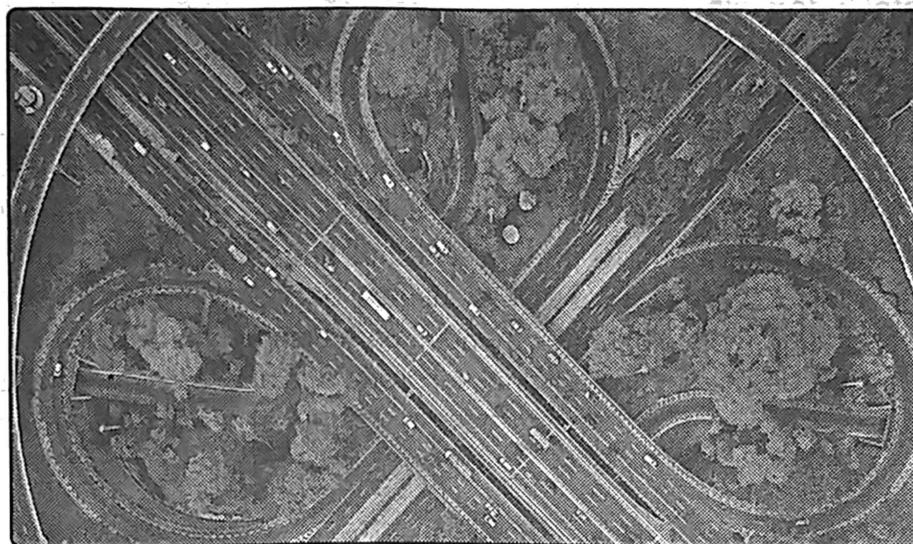
c. Jembatan Semanggi

Perencanaan pembangunan Jembatan Semanggi terjadi pada tahun 1960-an. Kala itu kondisi Jakarta kacau bälau karena terjadi kemacetan parah di berbagai daerah akibat pertumbuhan lalu lintas yang terjadi begitu pesat. Ditambah lagi saat itu Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 1962.

Presiden Soekarno pun berinisiatif mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah kemacetan itu dengan cara merencanakan pembangunan Jembatan Semanggi

sebagai bagian dari proyek perluasan dan pengembangan jalan tol di Ibu Kota. Proyek pembangunan Jembatan Semanggi dimulai pada 1961.

Proyek yang diinisiasi Presiden Soekarno ini tentu saja ditentang masyarakat pada awalnya. Itu karena pada tahun tersebut, Indonesia tengah mengalami krisis ekonomi. Namun, Soekarno tetap dengan pendiriannya melanjutkan proyek Jembatan Semanggi dengan bantuan dari Soetami, arsitek kebanggaan Indonesia yang saat itu menjabat Menteri Pekerjaan Umum. Jembatan Semanggi diklaim sebagai *cloverleaf bridge* terbesar di Asia Tenggara. Jembatan Semanggi diresmikan pada tahun 1962.



Sumber: www.ayobandung.com

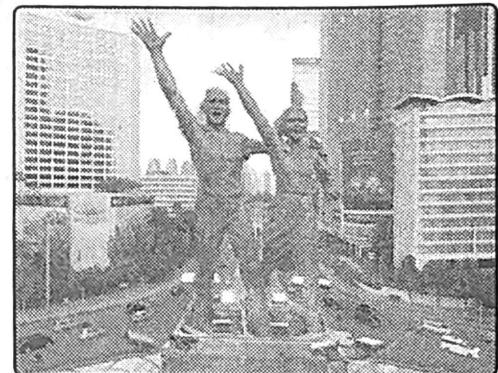
Jembatan Semanggi

d. Monumen Selamat Datang

Patung Selamat Datang dibuat oleh Edhie Sunarso tahun 1961 sebagai bentuk simbolis penyambutan para tamu mancanegara. Monumen ini digambarkan dalam bentuk dua orang terdiri atas pemuda dan pemudi memberi selamat datang. Pada tangan sang pemudi terlihat memegang rangkaian bunga, dimaksudkan sebagai penyambutan.

Alasan penempatan tugu/monumen ini berdasarkan pertimbangan bahwa Hotel Indonesia (HI) pada waktu itu merupakan pintu gerbang masuk kota Jakarta. Di samping itu, dalam rangkaian dengan pertandingan-pertandingan selama Asian Games yang diselenggarakan di Senayan, lokasi ini merupakan gerbang menuju gelanggang olahraga.

Semua olahragawan dan tamu asing yang datang ke Jakarta dari lapangan terbang Internasional Kemayoran waktu itu, langsung menuju Hotel Indonesia yang oleh panitia penyelenggara dijadikan pusat penginapan mereka. Dengan demikian, sebelum mereka memasuki penginapan di Hotel Indonesia, terlebih dahulu melintas pada lokasi Tugu Selamat Datang di depan hotel tersebut.



Sumber: <https://gny.com/>
Monumen Selamat Datang

e. Monas

Presiden Soekarno memerintahkan pembangunan Monas pada 17 Agustus 1961. Soekarno ingin Monumen Nasional berada tepat di depan Istana Merdeka sebagai simbol perjuangan rakyat. Akhirnya, Monas dibangun di Lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Pembangunan Monas berhasil dibangun dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975.

Di satu sisi, pelaksanaan politik mercusuar berdampak baik bagi eksistensi Indonesia di mata dunia. Proyek-proyek yang dilaksanakan membuat Indonesia punya berbagai fasilitas dan monumen nasional yang dapat dinikmati hingga saat ini. Akan tetapi, politik mercusuar memiliki dampak negatif bagi Indonesia, bahkan sering kali dianggap merugikan ekonomi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan proyek-proyek besar tersebut membutuhkan uang yang tidak sedikit. Beban anggaran negara melonjak karena proyek pembangunan tersebut hingga akhirnya terjadi krisis ekonomi. Anggaran yang membengkak itu tidak disertai dengan pendapatan yang memadai, belum lagi Indonesia baru saja bebas dari penjajah. Politik mercusuar pada akhirnya hanya membuat Indonesia mengalami inflasi dan menambah utang negara. Pada dasarnya, kebijakan politik ini dibuat hanya untuk memenuhi ambisi Soekarno untuk menunjukkan Indonesia ke mata dunia.

3. Kebijakan Kesehatan



Sumber: <https://biografiku.com/>
dr. J. Leimena salah satu pencetus
Bandung Plan

Bandung Plan adalah konsep kesejahteraan masyarakat Indonesia di bidang kesehatan yang muncul pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Program tersebut dirumuskan oleh Johannes Leimena dan Abdoel Patah. Kemunculannya pada 1951 merupakan hasil dari keresahan mereka yang ingin mewujudkan pengobatan modern agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas.

Konsep *Bandung Plan* memiliki asumsi bahwa pelayanan kesehatan tak hanya soal aspek kuratif yang fokus pada penyembuhan, namun harus dikombinasikan dengan aspek promotif yang bisa mempromosikan kesehatan dan aspek preventif yang bisa mencegah masalah kesehatan. Perhatian terhadap lingkungan, baik fisik dan nonfisik harus menjadi sebuah kesatuan. Konsep yang dipresentasikan Leimena-Patah bertujuan untuk mengintegrasikan pusat kesehatan masyarakat, pendidikan kesehatan masyarakat, dan perawatan kuratif. Hal itu coba dilakukan agar pelayanan kesehatan di Indonesia bisa lebih efektif dan efisien.

Integrasi tersebut coba direalisasikan lewat empat tingkat pengembangan bidang kesehatan masyarakat, yaitu dengan melakukan pembangunan rumah sakit utama di kota, rumah sakit pembantu di daerah kabupaten, poliklinik di kawasan kecamatan, hingga pos kesehatan pada desa terpencil. Salah satu realisasi nyata gagasan itu tertuang dalam praktik pendidikan kesehatan yang berlaku pada tahun 1952. Kurikulum saat itu mewajibkan para dokter yang telah lulus untuk bekerja di daerah terpencil selama tiga tahun. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan perawatan medis yang lebih merata di Indonesia. Salah satu wujud integrasi dari *Bandung Plan* adalah terbentuknya puskesmas (pusat kesehatan masyarakat).

4. Kebijakan Pendidikan

Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan Kurikulum 1947. Sistem Kurikulum 1952 sudah mengarah pada sistem pendidikan nasional, yaitu mengintegrasikan materi pelajaran sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama "Rentjana Pelajaran Teruraj 1952".

Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan Mr. Wongsonegoro bersama dengan H. Wahid Hasyim selaku Menteri Agama merevisi sistem pendidikan dengan menetapkan UU No. 4 Tahun 1950.

Berikut perubahan UU No. 4 Tahun 1950.

- a. Pelajar pendidikan agama diberikan pada sekolah rendah (umum) dan lanjutan (kejuruan) yang dimulai pada siswa kelas 4 maksimal dua jam per minggu.
- b. Pada siswa kelas 1, 2, dan 3 Sekolah Rakyat, penggunaan bahasa daerah digunakan sebagai pendamping bahasa Indonesia.
- c. Penggunaan bahasa Indonesia digunakan sejak kelas 1 Sekolah Rakyat sampai ke perguruan tinggi.
- d. Bahasa Belanda dihapuskan dari sistem pendidikan Indonesia.
- e. Beberapa sekolah yang masih mengikuti sistem dari Belanda diharuskan untuk mengikuti sistem baru sejak 1951.



Sumber: <https://wikipedia.com>
Mr. Wongsonegoro

Kebijakan demokrasi pendidikan dan program wajib belajar

6 tahun diterapkan kepada seluruh warga negara yang sudah berumur 8 tahun. Pemerintah Indonesia saat itu sedang berusaha untuk mengurangi buta huruf di masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan masyarakat melalui jalur pendidikan di luar sekolah formal juga digalakkan melalui program kursus Pemberantasan Buta Huruf (PBH), Kursus Pendidikan Umum A (KPU/A setara SD), dan Kursus Pendidikan Umum B (KPU/B setara SMP).

Perkembangan politik masa 1959–1967 mengalami masa sulit. Kehidupan perekonomian memburuk. Terjadi inflasi hingga 600% yang mengakibatkan alokasi anggaran untuk pendidikan semakin mengecil. Kebijakan wajib belajar tidak dapat terlaksana dengan baik seiring dengan kegagalan bidang ekonomi dan politik.

E. Kemelut Pergantian Kekuasaan

Penyebab berakhirnya demokrasi terpimpin adalah kondisi politik dan keamanan masa Orde Lama yang kacau karena terjadinya Gerakan 30 September 1965 (G-30-S/PKI). Soekarno menetapkan dan menerapkan konsep Nasakom dalam kepemimpinannya. Namun, dalam perkembangannya, Soekarno dipersepsikan condong ke kubu komunis. Hal ini terlihat pada keberpihakan Soekarno ketika PKI terlibat perseteruan dengan kabinet dan tentara. Selain itu, pada Agustus 1960, pemerintah membubarkan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi yang merupakan pesaing utama PKI. Partai NU dan PNI juga telah dilumpuhkan pengaruhnya.

Permasalahan lebih kompleks ketika PKI memiliki program agraria di daerah-daerah. PKI melakukan propaganda dengan cara pengambilan paksa tanah dari orang-orang "Tujuh Setan Desa". Mereka terdiri atas tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijlon, tengkulak jahat, kapitalis birokrasi desa, pejabat desa jahat, dan bandit desa. Puncaknya, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 dengan cara menculik para jenderal. Hingga saat ini terdapat banyak perdebatan mengenai dalang dari Gerakan 30 September 1945. Berikut beberapa versi mengenai dalang Gerakan 30 September 1965.

1. Keterlibatan CIA

Sebagai konsekuensi dari Perang Dingin agar Indonesia tidak jatuh ke komunis, Amerika Serikat menyiapkan beberapa opsi terkait situasi politik di Indonesia. Menurut David T. Johnson dalam *Indonesia 1965: The Role of the US Embassy*, dengan opsi di antaranya membiarkan saja, membujuk Soekarno beralih kebijakan, menyingsirkan Soekarno, mendorong angkatan darat merebut pemerintahan, merusak kekuatan PKI dan merekayasa kehancuran PKI sekaligus menjatuhkan Soekarno. Opsi terakhir yang dipilih.

Adapun keterlibatan Amerika Serikat melalui operasi CIA (Dinas Intelijen Amerika Serikat) dalam peristiwa G-30-S diungkap berbagai sumber. Peter Dale Scott, profesor dari University of California menulis *US and the Overthrow of Soekarno, 1965–1967, Pacific Affairs* (1985). Menurut Dale, CIA membangun relasi dengan para perwira AD dalam Seskoad (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat). Salah satu perwiranya adalah Soeharto. Begitu pula tulisan Geoffrey Robinson yang berjudul *Some Arguments Concerning US Influence and Complicity in the Indonesia Coup of October 1, 1965* merupakan analisis yang mengasumsikan bahwa CIA adalah dalang utama G-30-S.

Sumber lain, misalnya, *Di Balik Keterlibatan CIA: Bung Karno Dikhianati* (2001) karya wartawan Belanda Willem Oltmans. Begitu pula buku *Bung Karno Menggugat: Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G-30-S* (2006) karya sejarawan Baskara T. Wardaya. Semua menyebut adanya keterlibatan CIA.

Sejarawan John Roosa juga mengungkap bahwa pada akhir 1965, Amerika Serikat memberikan perangkat komunikasi radio lapangan yang sangat canggih ke Kostrad. Antennanya dipasang di depan Markas Besar Kostrad. Wartawan investigasi, Kathy Kadane dalam wawancaranya dengan para mantan pejabat tinggi Amerika Serikat di akhir 1980-an menemukan bahwa Amerika Serikat telah memantau komunikasi angkatan darat melalui radio-radio tersebut.

Amerika Serikat juga memberikan bantuan dana sebesar Rp50 juta (sekitar \$10.000) untuk membiayai kegiatan KAP Gestapu (Komite Aksi Pengganyangan Gerakan September Tiga Puluh). Selain itu, CIA juga memberikan daftar nama-nama tokoh PKI kepada Angkatan Darat.

2. Bertemu Kepentingan Inggris dan Amerika Serikat

Versi ini mensinyalir bahwa G-30-S adalah pertemuan rencana Inggris dengan Amerika Serikat. Inggris berkeinginan agar sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri dengan penggulingan kekuasaannya, sedangkan Amerika Serikat menginginkan Indonesia terbebas dari komunisme. Greg Poulgrain, penulis buku *The Genesis of Confrontation: Malaysia, Brunei and Indonesia, 1945–1965*, percaya pada asumsi bahwa G-30-S adalah sebuah pertemuan kepentingan Inggris dan Amerika Serikat.

3. Keterlibatan Soekarno

Setidaknya ada tiga buku yang menduga Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa G-30-S. Penulis dan judul buku yang dimaksud adalah Victor M. Fic, *Anatomy of the Jakarta Coup, October 1, 1965* (2004); Antonie C.A. Dake, *The Sukarno File, 1965–67: Chronology of a Defeat* (2006) yang sebelumnya terbit berjudul *The Devious Dalang: Sukarno and So Called Untung Putsch: Eyewitness Report by Bambang S. Widjanarko* (1974); dan Lambert Giebels, *Pembantaian yang Ditutup-tutupi, Peristiwa Fatal di Sekitar Kejatuhan Bung Karno*.

Menurut Asvi Warman Adam menyatakan bahwa ketiga buku tersebut mengarah kepada de-Soekarnoisasi, yaitu menjadikan Presiden pertama RI itu sebagai dalang peristiwa Gerakan 30 September dan bertanggung jawab atas segala dampak kudeta berdarah itu.

4. Tidak ada Pemeran Tunggal dan Skenario Besar (Teori Chaos)

Versi ini diyakini oleh Ir. Soekarno (dalam dua pidatonya, yakni *Nawaksara* dan *Pelengkap Nawaksara*). Menurut versi ini, G-30-S adalah sebuah konspirasi ketika unsur-unsur Nekolim (neokolonialisme dan imperialisme) menggagalkan jalannya Revolusi Indonesia. Hal ini terjadi ditunjang kepemimpinan PKI yang keliru dan oknum-oknum AD yang tidak benar. Teori ini dikemukakan oleh John D. Legge.

5. Keterlibatan Soeharto

Versi ini pertama kali diungkapkan oleh sosiolog Belanda W.F. Wertheim dalam artikelnya yang berjudul *Soeharto and the Untung Coup-The Missing Link* (1970). Dikatakan bahwa

pada malam 1 Oktober 1965 terjadi pertemuan Soeharto dengan Latief dan Letkol Untung pimpinan tim penculik ketujuh jenderal. Namun, banyak pula ahli sejarah dan politik yang berpendapat bahwa Soeharto bukan tipe orang jenius yang bisa merancang kudeta secara sistematis. Soeharto hanyalah orang yang sudah tahu sebelum kejadian naas itu terjadi melalui pertemuannya dengan Untung dan Latief sehingga ia menjadi orang yang paling siap. Kesiapannya inilah yang menjadi senjata mematikan untuk menumpas PKI sekaligus merebut kekuasaan dari Soekarno.

6. Sebagian Perwira Angkatan Darat dengan PKI sebagai Pemain Kedua

Benedict R.O.G. Anderson dan Ruth Mc. Vey merupakan sejarawan Cornell University pada tahun 1966 menyatakan bahwa G-30-S berasal dari persoalan intern TNI AD. Mereka mengemukakan dalam *A Preliminary Analysis of the October 1 1965, Coup in Indonesia* atau yang lebih dikenal sebagai *Cornell Paper* (1971) beberapa perwira TNI AD dari Kodam IV/Diponegoro kesal melihat para jenderal hidup berfoya-foya di Jakarta. Para perwira dari Jawa Tengah itu kemudian mengajak Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dan PKI dalam menjalankan operasinya.

Versi ini agak lemah karena faktanya Brigjen Supardjo berasal dari Kodam Siliwangi. Demikian pula dengan Mayor Udara Sujono. Walaupun memang Untung dan Latief dari Kodam IV/Diponegoro. Versi ini kemudian ditengahi oleh Harold Crouch dalam *The Army and Politics* (1978) yang menolak *Cornell Paper* dengan mengatakan bahwa inisiatif awal gerakan ini timbul dari tubuh TNI AD, sedangkan PKI bertindak sebagai "pemain kedua" dengan mengacu pada keterlibatan Sjam Kamaruzaman dan Pono dari Biro Khusus PKI.

7. Dalang Gerakan 30 September adalah PKI

Teori ini merupakan teori yang paling umum dikenal bangsa Indonesia mengenai peristiwa 30-September 1965. Teori ini dikemukakan oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI pada kurun waktu 1959–1965. Dasar lainnya adalah beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri CC PKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten setelah G-30-S.

Terlepas dari berbagai teori yang berkembang tentang dalang di balik gugurnya para pahlawan revolusi, peristiwa tersebut membawa perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Sedikit demi sedikit kekuasaan Presiden Soekarno dikurangi hingga habis sama sekali. PKI dinyatakan oleh penguasa *de facto* saat itu sebagai pelaku di balik Gerakan 30 September 1965. Akibatnya, PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang melalui TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966. Ketetapan ini juga melarang penyebaran ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme di Indonesia. Selanjutnya, anggota PKI dan berbagai organisasi yang dianggap berafiliasi dengan kelompok komunis mengalami diskriminasi dan penindasan karena dianggap turut mengetahui dan bertanggung jawab atas peristiwa pada malam 30 September 1965. Dengan demikian, peristiwa ini membawa efek domino yang sangat besar dalam sejarah Indonesia.

Aktivitas Mandiri

Kerjakan sesuai perintahnya!

Carilah dari referensi dan berbagai literasi mengenai perbedaan antara sistem demokrasi liberal dan sistem demokrasi terpimpin. Berikan penjelasan mengenai dampak yang ditimbulkannya bagi bangsa Indonesia. Kerjakan di buku tugas Anda. Presentasikan hasilnya di depan kelas.